

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(STUDI KASUS DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN
BANYUMAS)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Lintang Nurul Fadilah

1806016043

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengoreksi dan memperbaiki sebagaimana semestinya, menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Lintang Nurul Fadilah

NIM : 1806016043

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2022



H. Drs. Nur Syamsudin, MA

NIP. 196805051995031002

SKRIPSI
PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(STUDI KASUS DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN
BANYUMAS)

Disusun Oleh :

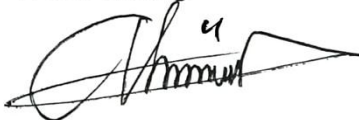
Lintang Nurul Fadilah

1806016043

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



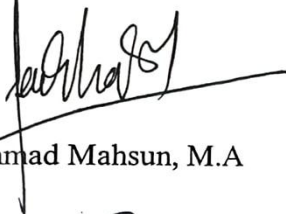
Dr. Ahwan Fanani, M. Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris Sidang



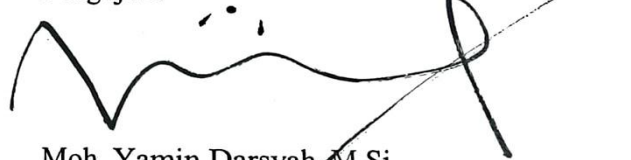
Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A
NIP. 196805051995031002

Penguji I



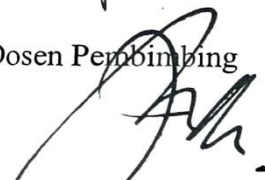
Muhammad Mahsun, M.A
NIP.

Penguji II



Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A
NIP. 196805051995031002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lainnya. Hasil pengetahuan yang didapatkan dari hasil penerbitan atau yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan melalui *bodynote* dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2022



Lintang Nurul Fadilah

NIM 1806016043

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Studi Kasus Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)". Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik S1 (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Alah SWT dan berbagai pihak yang telah memerikan dukungan dan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui dan mendukung penuh pembuatan skripisi ini.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A. dan Muhammad Mahsun, M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam proses pelaksanaan perkuliahan.
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Adib, M.Si. selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan.

6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Pejabat Pemerintahan Desa Dermaji dan masyarakat Desa Dermaji yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Maftuh dan Ibu Sumiyatun yang senantiasa mencurahkan segala cinta, kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, kesabaran, dan pengorbanan dalam hal moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat tumbuh dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Aamiin Ya Robbalalamin.
10. Keluargaku tersayang, kakak-kakakku terima kasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dalam segala hal, dan rezeki yang barokah, Aamiin YaRobbal'alamin.
11. Terkhusus untuk kakakku tersayang, mas Ismail Marzuki yang selalu memberikan arahan, dukungan, bantuan secara moril maupun materiil, dan menjadi penyemangat bagi penulis selama proses perkuliahan sampai penelitian skripsi ini selesai. Terimakasih atas segala doa dan perhatian yang kau berikan pada adikmu ini, semoga mas is selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, dilapangkan rezekinya, Aamiin Ya Robbal'alamin.
12. Keponakan-keponakan penulis tersayang, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, terimakasih sudah menghibur penulis dengan kelucuan kalian
13. Sahabat seperjuangan sejak maba, Siti Jazilatul Rohmah, Misfaatin Nisak, Sustania Via Lintas Sari, Alfina Rosdiana, Anang Kurniawan, kalian adalah sahabat yang luar biasa yang saling mendukung, mendoakan, membantu, menyemangati, dan masih banyak lagi sehingga penulis merasa bahagia dan mempunyai keluarga baru selama kuliah dan merantau di Semarang. Semoga

kalian sehat selalu dan ditunggu cerita-cerita kesuksesannya. Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amin Ya Robbalalamin

14. Sahabat seperjuangan saat di Ma'had UIN, Ilma dan zizah, kalian adalah sahabat yang sangat baik dan pengertian, mau mendengarkan keluh kesah apapun dan memberi masukan serta semangat untuk penulis. Terimakasih atas bantuan-bantuan yang telah kalian berikan, penulis sangat bersyukur punya sahabat seperti kalian, walaupun nantinya jarak akan mempersulit kita untuk bertemu tetapi semoga persahabatan ini tetap terjalin sampai tua nanti. Tetap semangat untuk kalian berdua, jangan lupa makan dan jaga kesehatan.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, khususnya Politik B. Terima kasih untuk kebersamaannya selama perkuliahan, semoga kalian juga selalu baik baik saja dan ditunggu kesuksesannya.
16. Teman-teman Orda Cilacap SEMACI, khususnya hikmah, gopeng, tio, gojeh yang selalu mau mendengarkan, menyemangati dan membantu penulis. Terima kasih atas kebaikan dan kebersamaannya, sukses selalu untuk kalian. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin.
17. Teman-teman organisasi LKS-BMH Jawa Tengah dan An-Niswa Walisongo, terima kasih telah memberikan kesempatan pada penulis untuk berproses, belajar bersama, dan berbagi pengalaman yang luar biasa, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan pembelajaran yang berharga dari organisasi yang penulis ikuti.
18. Teman-teman KKN MIT DR 12 Kelompok 10, Jazil, Fatin, Sari, Alfina, Inka, Kharisma, Munawir, Izaz, Dauf, Fariqh, Ashar, Rohman, Taufiq, Ozi. Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama KKN semoga pertemanan ini tidak berhenti disini.
19. Drama korea, K-POP (NCT, EXO), dan kak Geby yang telah memberikan hiburan dengan konten-konten yang kalian sajikan sehingga membuat mood penulis kembali membaik dan bersemangat untuk mengerjakan skripsi.
20. Terkhusus untuk Kim Jongin dan Jung Jaehyun sang bias tersayang penulis yang mampu membuat penulis suka K-Pop untuk pertama kalinya, terimakasih telah memberikan semangat dan mood penulis membaik, tetap sehat dan semangat untuk kalian bias kesayangan penulis.
21. Para author watsapp, terkhusus untuk kak renita sang author watsapp favorit penulis yang secara tidak langsung telah memberikan banyak pembelajaran dan

motivasi pada penulis melalui karya-karyanya, terimakasih atas karya-karya yang telah kau terbitkan, tetap semangat untuk kita semua.

22. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan kalian.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dan berlimpah dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Dalam proses penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, meskipun dalam proses penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Yang mana pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya untuk penulis dan untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Juni 2022

Penulis



Lintang Nurul Fadilah

NIM 1806016045

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Orangtuaku tercinta **Ibu Sumiyatun** serta **Bapak Maftuh** yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, selalu mendoakan dan mendukung disetiap langkahku. Terimakasih sudah selalu sabar menghadapi anakmu ini mah, pah. Dan juga untuk kakak-kakakku yang selalu memberi arahan dan semangat, terimakasih mas mbak.

I Love You My Family.

Terimakasih almamaterku FISIP UIN Walisongo Semarang

MOTTO

**“Kerjakan dan fokuslah pada apa yang ada didepanmu.
Mengeluh boleh, menyerah jangan, Ingatlah Allah selalu
bersama kita”**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya sosok kepala desa yang bertanggungjawab ini sangatlah penting karena maju tidaknya suatu desa tergantung dari bagaimana kepala desa dalam mengelola pemerintahannya, seperti halnya yang terjadi di Desa Dermaji, sejak kepemimpinan Bayu Setyo Nugroho ini desa Dermaji menjadi lebih maju dan dikenal oleh publik, bahkan telah mendapatkan berbagai prestasi skala lokal maupun nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam suatu kasus yang dikaji. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya melalui wawancara dengan mengambil beberapa narasumber dari pihak pemerintah dan masyarakat, yang terakhir yaitu melalui dokumentasi berupa dokumen dan foto sebagai data pendukung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *good governance* sebagai landasan teori untuk menganalisis sejauhmana implementasi prinsip *good governance* yang diterapkan di Desa Dermaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepala desa Dermaji menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, adapun prinsip *good governance* yang diterapkan yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipasi, namun dalam penerapan ketiga prinsip tersebut belum terlaksana secara maksimal. Dari data-data yang telah didapatkan dilapangan, terlihat bahwa kepala desa Dermaji telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa Dermaji memberikan informasi secara transparan mengenai dana desa dan melibatkan unsur masyarakat dalam pengembangan informasi di website desa, kepala desa juga melakukan pendekatan secara langsung pada masyarakat supaya partisipasi masyarakat dapat meningkat serta memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pembuatan kebijakan melalui musyawarah dusun maupun diskusi khusus kelompok masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya yaitu kepala desa kurang tegas dalam memberikan sanksi pada perangkat desa yang tidak menaati peraturan ketertiban waktu dan juga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi pada para perangkat desa mengenai pencegahan praktik KKN, adanya keterlambatan penyampaian informasi di website desa Dermaji mengenai kegiatan desa karena yang dapat mengakses ke akun website desa hanya satu orang saja, kemudian juga masih ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat yang belum direalisasikan.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, *Good Governance*

ABSTRACT

This study examines the role of village heads in realizing good governance. The existence of a responsible village head is very important because the progress of a village depends on how the village head manages his government, as happened in Dermaji Village, since Bayu Setyo Nugroho's leadership, Dermaji village has become more advanced and known to the public, and has even received various local and national achievements. The purpose of this study is to provide an understanding of the efforts made by village heads in realizing good governance.

This study uses a qualitative research method with a case study approach, in which this qualitative research method is used to examine in depth a case being studied. Then the data collection techniques carried out in this study were through observations or observations made in Dermaji Village, Lumbr District, Banyumas Regency, then through interviews by taking several sources from the government and the community, the last one was through documentation in the form of documents and photos as supporting data. The theory used in this study is the theory of *good governance* as a theoretical basis to analyze the extent to which the implementation of *good governance principles* is applied in Dermaji Village.

The results of this study indicate that in realizing good governance, the village head of Dermaji applies the principles of *good governance*, while the principles of *good governance* applied are the principle of accountability, the principle of transparency, and the principle of participation. From the data that has been obtained in the field, it can be seen that the Dermaji village head has carried out his duties and obligations, the Dermaji village head provides information transparently about village funds and involves community elements in developing information on the village website, the village head also approaches the community directly. so that community participation can increase and provide opportunities for the community to participate in every policy making through village deliberations and special discussions for community groups. The obstacles faced include the village head being less strict in giving sanctions to village officials who do not obey the time order regulations and also not being optimal in conducting socialization to village officials regarding the prevention of KKN practices, the delay in submitting information on the Dermaji village website regarding village activities because only one person can access the village website account, then there are also some inputs from the community that have not been realized.

Keywords: Role, Village Head, *Good Governance*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritik	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sumber dan Jenis Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	14
A. Definisi Konseptual	14
1. Kepala Desa	14

2.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16
B.	Good Governance Sebagai Kerangka Teori.....	18
BAB III LANDSCAPE DESA DERMAJI SEBAGAI OBYEK PENELITIAN		24
A.	Gambaran Umum Desa Dermaji.....	24
1.	Kondisi Geografis	24
2.	Kondisi Demografi.....	26
3.	Kondisi Sarana dan Prasarana.....	30
B.	Profil Desa Dermaji	32
1.	Sejarah Desa Dermaji.....	33
2.	Kelembagaan Desa.....	36
3.	Bagan dan Struktur Pemerintahan Desa Dermaji.....	37
4.	Potensi Pengembangan Masyarakat.....	37
C.	Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	39
BAB IV PERAN KEPALA DESA DERMAJI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.....		44
A.	Akuntabilitas.....	45
1.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	46
2.	Adanya sanksi yang ditetapkan.....	48
3.	Pembuatan laporan pertanggungjawaban.....	50
4.	Berkurangnya praktik KKN.....	54
B.	Transparansi.....	55
1.	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	56
2.	Adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, dan terbuka untuk masyarakat umum	59
3.	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.....	65

C. Partisipasi.....	67
1. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.....	68
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah.....	69
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kritik saran dari masyarakat.....	71
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.....	72
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Tanah Menurut Penggunaan	26
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	27
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat	27
Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Desa Dermaji.....	28
Tabel 5. Aset Kepemilikan Tanah Desa Dermaji	29
Tabel 6. Jumlah Kepemilikan Ternak Penduduk Desa Dermaji	30
Tabel 7. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	30
Tabel 8. Daftar Ruas Jalan Utama Desa Dermaji	31
Tabel 9. Kelmebagaan Desa Dermaji	36
Tabel 10. Susunan Pemerintahan Desa	37
Tabel 11. Jumlah Tutor dan Siswa Paud Desa Dermaji 2020/2021.....	37
Tabel 12. Jumlah Guru dan Siswa TK Desa Dermaji 2020/2021	38
Tabel 13. Jumlah Siswa SD Desa Dermaji 2020/2021	38
Tabel 14. Jumlah Siswa SMPN 3 Lumbir di Desa Dermaji 2020/2021	38
Tabel 15. Potensi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dermaji	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Banyumas	25
Gambar 2. Peta Wilayah Lumir	25
Gambar 3. Kantor Balaidesa Dermaji	32
Gambar 4. Laporan Pertanggungjawaban APBDes 2021	52
Gambar 5. Surat Keputusan BPD	53
Gambar 6. Stuktur Posko Covid-19 Desa Dermaji	58
Gambar 7. Infografik APBDes di Depan Kantor Balaidesa	58
Gambar 8. Tampilan Website Desa Dermaji	62
Gambar 9. Tampilan Facebook Desa	64
Gambar 10. Tampilan Youtube Desa.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian.....	81
Lampiran 2. Dokumentasi Foto di Desa Dermaji	82
Lampiran 3. Dokumen Desa Dermaji	84
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan tatanan pemerintahan terbawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu desa memiliki peranan yang sangat penting, di mana desa ini diharapkan menjadi tumpuan dalam mensejahterakan masyarakat pada lingkup wilayah desa tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, sesuai kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa ini merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, perlu memiliki suatu konsep yang dapat mengatur jalannya tata kelola pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu kesepakatan yang diputuskan secara bersama-sama oleh semua elemen pada suatu wilayah tertentu untuk mengelola pemerintahan. Dan *good governance* dipilih sebagai suatu konsep yang dianggap mampu digunakan sebagai solusi untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya mampu meningkatkan pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi. Dengan adanya penerapan *good governance*, diharapkan dapat mengurangi adanya pola kepemimpinan yang otoritar sehingga masyarakat desa mempunyai ruang untuk ikut andil dalam pembangunan desa.

Menurut Ramdhan (2021) dari studi yang telah dilakukannya dengan menggunakan analisis prinsip-prinsip *good governance* ini ternyata telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, salah satu contohnya yaitu Desa Margamulya

Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, di desa tersebut pihak pemerintah telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, namun memang dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana secara optimal karena kurangnya pemahaman hukum terkait tupoksi perangkat desa, penyampaian informasi yang lambat, kurangnya efektifitas dan evaluasi kerja, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta tidak adanya anggaran untuk pengembangan bagi perangkat desa, kemudian pemerintah desa melakukan upaya untuk menangani hambatan tersebut dengan mempercepat pengambilan keputusan, melakukan pendampingan serta menggunakan aplikasi smart phone untuk menyebarkan informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan juga adanya sosok kepala desa yang bertanggung jawab, mengayomi masyarakatnya, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan tata pemerintahan desa dengan berpedoman pada prinsip *good governance* supaya tercapai kesejahteraan masyarakat desa. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengarahannya terhadap masyarakat desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan pemerintahan yang baik, kepala desa memiliki peran penting dan pengaruh yang besar bagi berjalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Oleh karenanya, kepala desa harus melibatkan seluruh lembaga pemerintahan desa dan juga partisipasi masyarakat, baik dalam hal pengambilan keputusan, penetapan kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan tersebut supaya dapat tercipta tata pemerintahan yang baik serta mampu membawa masyarakat desanya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya sendiri (Raharja, 2001).

Seperti halnya yang terjadi di desa Dermaji, Desa ini terletak dibagian paling barat dari wilayah Kabupaten Banyumas, yang mana hal tersebut membuat desa Dermaji ini terpencil, jauh dari pusat kota dan tidak banyak dikenali oleh publik. Namun sekarang ini, berkat kegigihan serta semangat kebersamaan yang dilakukan oleh semua pihak yang ada di desa tersebut baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat, mampu membawa desa Dermaji menjadi desa yang sukses, makmur dan dikenal oleh publik. Desa Dermaji ini juga telah

memanfaatkan teknologi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan memanfaatkan website desa sebagai wadah informasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh desa, serta informasi mengenai transparansi penggunaan dana desa melalui website yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum (Sejarah Desa Dermaji, 2015).

Kemajuan Desa Dermaji ini juga tidak terlepas dari adanya peran kepala desa Dermaji saat ini yaitu Bayu Setya Nugroho, beliau sudah menduduki jabatan sebagai kepala desa di desa Dermaji selama 3 periode yaitu sejak 2005 hingga saat ini. Beliau adalah seorang yang berpendidikan sarjana S2 ilmu pemerintahan, yang mana berdasarkan latar belakang pendidikannya, sudah dapat dipastikan bahwa beliau paham mengenai bagaimana mengelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sejak desa Dermaji dipimpin oleh bapak Bayu, perkembangan desa ini semakin pesat, beliau mampu membawa desa Dermaji meraih berbagai penghargaan dan mampu memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga tata kelola pemerintahannya menjadi lebih teratur dan transparan serta mampu mengelola sumber daya yang ada di desa Dermaji secara optimal sehingga desa Dermaji menjadi desa yang maju. Kemudian, dalam setiap pengambilan keputusan, beliau juga selalu melibatkan masyarakat desa, bahkan tak jarang beliau turun langsung mendatangi masyarakat untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, beliau sangat menghargai dan menampung seluruh masukan dari masyarakat yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah desa.

Keberhasilan Kepala Desa Dermaji dalam memajukan desanya sehingga mampu dikenal oleh khalayak publik dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diperoleh baik ditingkat provinsi maupun nasional diantaranya yaitu *Pertama*, meraih juara 1 kategori Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa dalam ajang penghargaan Sikompak Award PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. *Kedua*, desa ini masuk menjadi top 99 pada ajang inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. *Ketiga*, desa ini mendapatkan penghargaan dari Tempo Media Group bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT), desa Dermaji menjadi salah satu dari 7 desa unggulan Tempo 2016. *Keempat*, mendapatkan penghargaan Destika desa.id Award 2016 yang diadakan di

Jayapura Papua, desa Dermaji dikukuhkan sebagai salah satu desa yang menjadi perintis dalam publikasi daring yang memanfaatkan domain internet khusus desa. *Kelima*, mendapatkan sertifikat ODF(Open Defecation Free) pada tahun 2016, sertifikat ini diberikan kepada desa yang dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). *Keenam*, memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam ajang KIP Award 2018 sebagai desa dengan *website* informatif (Sejarah Desa Dermaji, 2015).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa terutama kepala desa, memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik apabila mampu menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik dari pemerintahan desa maupun masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Desa Dermaji. Maka penelitian ini berjudul **“Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Studi Kasus Desa Dermaji Kecamatan Lumir Kabupaten Banyumas)”**. Dalam mengkaji penelitian mengenai tata kelola pemerintahan, penulis menggunakan prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan teori untuk menganalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada bagaimana peran kepala desa dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Dermaji, dan untuk membatasi kajian ini, penulis menggunakan tiga prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Tiga prinsip tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai tolak ukur sejauhmana peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta untuk mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data dan analisis datanya serta ketiga prinsip tersebut juga saling berkaitan dan sudah mencakup mengenai pertanggungjawaban, transparansi dana, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang mana ketiga hal tersebut berpengaruh bagi berjalannya pembangunan suatu desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Desa Dermaji ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Desa Dermaji

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan diperkuliahan dengan kejadian nyata yang ada di masyarakat.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi mahasiswa maupun akademisi lainnya yang akan melakukan penelitian yang serupa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang selaras di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan yang terjadi di desa.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau *role model* bagi pemerintah desa lain dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara jelas mengenai bagaimana peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan desa memang bukanlah suatu hal yang baru karena penelitian ini sudah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melakukan peninjauan terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu guna membedakan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Aditya Ramdhan (2021) yang berjudul "*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*". Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* dan hambatan-hambatan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori *good governance* dari *United Nations Development Programme* (UNDP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* tersebut belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya pemahaman hukum terkait tupoksi perangkat desa, penyampaian informasi yang lambat, kurangnya efektifitas dan evaluasi kerja, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta tidak adanya anggaran untuk pengembangan perangkat desa, kemudian solusi yang diterapkan pemerintah desa untuk menangani hambatan tersebut yaitu mempercepat pengambilan keputusan, melakukan pendampingan serta menggunakan aplikasi smart phone untuk menyebarkan informasi (Ramdhan, 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendi Sandi Putra (2017) yang berjudul "*Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*". Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan tata kelola pemerintahan *good governance* dan hambatan dalam pelaksanaan *good governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teori kelembagaan baru serta teori *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* ini belum terlaksana secara optimal karena ada

beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam tata kelola pemerintahan Desa Kalibelo yaitu pada aspek transparansi dan aspek akuntabilitas, kemudian usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip good governance yaitu peningkatan pendidikan serta pelatihan, bersinergi dengan pemuda, dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Putra, 2017).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Amanatun Suryani (2019) yang berjudul *“Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa”*. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan sistem informasi desa dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan *good governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo telah menerapkan keterbukaan informasi berupa website desa yang berisi profil desa, program kegiatan, dan laporan penggunaan anggaran, yang mana dengan adanya website desa ini dapat memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai desanya, dan websiter tersebut juga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaan *good governance* ini juga masih mengalami kendala diantaranya yaitu kurangnya pemahaman pihak pemerintah mengenai undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Suryani, 2019).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khaidir Ali dan Agung Saputra (2020) yang berjudul *“Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar”*. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan *good governance* dalam program peningkatan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Desa Pematang Johar telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan perwujudan *good governance* merupakan salah satu percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa supaya dapat tercapai kesejahteraan masyarakat desa,

namun dalam pelaksanaannya, pemerintah desa johar masih mengalami kendala yaitu kurangnya bantuan sumber daya manusia untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (Ali & Saputra, 2020).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Selfianti Faisal Arsik dan Herman Lawelar (2020) yang berjudul *“Penerapan Akuntabilitas, efektivitas, dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance :Studi Pemerintahan Desa Banabungi”*. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori agensi dan teori good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya terlaksana, ada beberapa indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan, dan beberapa indikator yang belum terlaksana ini karena masih adanya desa yang menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pengelolaan desa dari sistem tradisional ke sistem *New Public Management* (NPM) (Arsik & Lawelar, 2020).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yani Alfian yang berjudul *“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat”*. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran pemerintah desa serta hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan dianalisis menggunakan teori good governance. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Ciharashas telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya yaitu harus adanya transparansi dalam proses pelayanan, adanya kepastian hukum, dan selalu memperhatikan hak dan kewajiban masyarakatnya, namun permasalahan pelayanan publik di desa tersebut belum juga terselesaikan dengan baik, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu kurang efektifnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, adanya pelayanan yang dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, dan sering terjadinya kesalahan atau pendataan dalam pelayanan publik (Alfian, 2019).

Dari berbagai tinjauan pustaka tersebut diatas, maka penelitian ini akan berfokus untuk memperkuat penelitian dari Irfan Aditya Ramdhan yang berjudul *“Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*

Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis". Dalam penelitian tersebut sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih fokus menjelaskan mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Studi kasus Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) dengan menggunakan teori prinsip-prinsip Good Governance dari *United Nations Development Programme* (UNDP), yang mana berfokus pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi dalam kehidupan suatu obyek penelitian yang kemudian akan dikaitkan dengan pemecahan masalah secara teoritis maupun praktis (Bungin, 2015). Metode kualitatif merupakan serangkaian kegiatan penggalan informasi yang dilakukan melalui teknik observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok khusus, yang mana berusaha untuk memahami pengalaman dan praktik dari informan tersebut (Marsh & Stoker, 2011). Sedangkan pengertian penelitian kualitatif deskriptif adalah pengamatan secara kritis untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian (Ruslan, 2013). Penelitian kualitatif deskriptif ini juga digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu fenomena yang sedang dialami atau telah dialami oleh subyek penelitian (Herdiansyah, 2010).

Sedangkan studi kasus yaitu suatu proses untuk memahami, menelaah, menjelaskan, dan menguji secara detail tentang suatu peristiwa yang akan diteliti sesuai dengan konteksnya, metode pendekatan studi kasus ini langsung berfokus dan mengarah pada suatu inti suatu kasus yang akan dikaji dengan cara penggalan data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi (Suwendra, 2018).

Berdasarkan jenis dan metode pendekatan tersebut diatas, peneliti akan menelaah dan menjelaskan secara detail mengenai peran seorang kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Dermaji kecamatan Lumbir kabupaten Banyumas.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a) Data primer

Data primer merupakan data berupa kata-kata yang diperoleh secara langsung dari seorang informan penelitian, dan data ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (Siyoto, 2015). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan kepala desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat dari masing-masing dusun yang ada di desa Dermaji.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa dokumen-dokumen dan digunakan untuk menguatkan data primer (Siyoto, 2015). Dan dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi, dokumen arsip di desa Dermaji serta sumber buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang digunakan untuk menentukan keberhasilan atau hasil dari penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu :

a) Observasi atau pengamatan

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, observasi ini tidak terbatas hanya pada manusia saja tetapi juga obyek-obyek alam yang lainnya (Anggito, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung di Desa Dermaji untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Desa Dermaji.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data secara langsung yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan subyek penelitian, dan ketika hendak melakukan wawancara harus memperhatikan sikap dan tutur kata karena hal tersebut dapat mempengaruhi jawaban dari seorang informan (Satori & Komariah, 2011). Kemudian saat pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan handphone untuk merekam serta alat tulis untuk mencatat berbagai poin penting yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa Dermaji, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun yang ada di Desa Dermaji.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu jenis pengumpulan data dalam bentuk dokumen, catatan, foto, dan juga bahan statistik, yang mana data-data tersebut sangat membantu bagi peneliti untuk menganalisa lebih dalam sesuai dengan kebutuhan (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah didapatkan sebagai data tambahan yang dibutuhkan, selain dari hasil wawancara, maupun observasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan makna dari data yang telah dihasilkan dengan cara mengumpulkan data tersebut sesuai dengan klasifikasi tertentu (Siyoto, 2015).

Adapun teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan penggalan data dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan hanya pada hal-hal yang penting serta sesuai dengan pokok permasalahan. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus untuk menghasilkan inti dari data yang diperoleh (Siyoto, 2015).

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan penyajian berbagai kumpulan informasi yang kemungkinan didalamnya terdapat juga penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti memaparkan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti (Siyoto, 2015).

c) Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada tahap ini, peneliti mengungkapkan makna dari data-data yang telah diperoleh, hal ini dilakukan untuk memperjelas makna atau hasil akhir dari temuan penelitian yang dilakukan (Siyoto, 2015).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai alasan yang menjadi latar belakang penelitian ini, kemudian juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode dan pendekatan penelitian.

BAB II TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan oleh peneliti.

BAB III LANDSCAPE DESA DERMAJI SEBAGAI OBYEK PENELITIAN

Pada bagian ini dipaparkan mengenai gambaran umum Desa Dermaji sebagai obyek penelitian. Gambaran umum Desa Dermaji yang akan dipaparkan ini diantaranya yaitu profil Desa Dermaji berdasarkan kondisi geografis, kondisi topografi, iklim dan curah hujan, hidrologi dan klimatologi, serta kondisi demografis, selanjutnya profil Desa Dermaji berdasarkan sejarah desa, struktur pemerintahannya, dan tata kelola pemerintahan Desa Dermaji

BAB IV PERAN KEPALA DESA DERMAJI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pada bab ini membahas secara detail mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menggunakan teori *good governance*, yang mana berfokus pada bagaimana peran kepala desa dalam menerapkan tiga prinsip dari *Good Governance* yaitu *Akuntabilitas*, *Transparansi*, dan *Partisipasi*. Dari ketiga prinsip tersebut akan dianalisis secara mendalam dengan mengacu pada indikator dari masing-masing prinsip tersebut dan dikaitkan dengan temuan-temuan yang ada di lapangan

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta berisi mengenai saran.

BAB II

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini merupakan pemaknaan berdasarkan berbagai konsep yang telah ditetapkan, sehingga mampu memudahkan peneliti dalam menerapkan konsep tersebut dilapangan.

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Kepala Desa

Pemerintahan desa terbagi menjadi dua unsur yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing memiliki peranan yang penting, terutama Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemimpin atas pemerintahan di tingkat desa yang memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat berulang selama tiga periode masa jabatan, kepala desa juga merupakan pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat melalui pemilihan, dan mempunyai kewajiban untuk mengatur semua urusan tentang kesejahteraan masyarakat desa (Ndraha, 1990).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala desa atau yang dapat disebut dengan kepala pemerintahan desa yang bertugas memimpin seluruh kegiatan atau program yang di selenggarakan oleh pemerintahan desa, kepala desa disini memiliki peranan penting karena kepala desa ini pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri serta melakukan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menjalankan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa (Saparin, 2009). Selain itu, Kepala desa juga memiliki beberapa wewenang yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diantaranya :

- a. Menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Membuat peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- f. Melakukan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat Desa
- g. Menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Meningkatkan perekonomian Desa
- i. Mengembangkan sumber Pendapatan Asli Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk peningkatan kesejahteraan Desa
- k. Meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi informasi
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa
- n. Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan
- o. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Kepala Desa juga memiliki kewajiban, diantaranya :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menjalankan kehidupan yang demokratis
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh rekan kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan
- h. Melakukan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melakukan mempertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa
- j. Menjalankan urusan yang berkaitan dengan kewenangan desa
- k. Menjadi penengah atas perselisihan yang terjadi di masyarakat desa

- l. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
- m. Mengayomi, membina dan menjaga nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya
- n. Melakukan pemberdayaan terhadap kelembagaan desa dan masyarakat desa
- o. Meningkatkan potensi dari sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
- p. Menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati.
- q. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan memberikan informasi terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat umum .

Berdasarkan penjabaran mengenai wewenang dan kewajiban Kepala Desa diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan seorang pemimpin di tingkat desa dan aktor penting dalam pemerintahan desa, peran kepala desa sangatlah penting bagi kemajuan suatu desa, maju atau tidaknya desa bergantung dari bagaimana kepala desa tersebut mengelola pemerintahannya. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Kepala Desa dalam menjalankan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik..

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Salah satu permasalahan mendasar yang seringkali terjadi saat proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam hal menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang mana dalam hal ini pemerintah harus melakukan pembangunan berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat serta mampu menyediakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Dan pemerintahan yang baik harus bertujuan kepada dua hal, yaitu tujuan ideal yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional dan mengacu pada demokratisasi kehidupan bernegara, dan pemerintahan yang berfungsi secara ideal merupakan suatu upaya yang dijalankan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan nasional (Solekhan, 2014)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga harus sesuai dengan asas peraturan desa seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diantaranya yaitu :

- a. Kepastian hukum merupakan asas yang mementingkan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan adanya keadilan pada setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Tertib penyelenggaraan pemerintah merupakan asas yang berpegang berdasarkan pada keseimbangan dan keteraturan terhadap pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang memiliki landasan pada kesejahteraan umum
 - d. Keterbukaan adalah asas yang mengutamakan keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Proporsionalitas merupakan asas yang berlandaskan pada prioritas keseimbangan antara kewajiban dan hak penyelenggaraan pemerintahan desa
 - f. Profesionalitas merupakan asas yang berdasarkan pada kode etik serta ketentuan perundang-undangan
 - g. Akuntabilitas merupakan asas yang mengutamakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - h. Efisiensi dan efektivitas adalah asas yang berlandaskan pada pencapaian tujuan dan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - i. Kearifan lokal merupakan asas yang mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam setiap penetapan kebijakan.
 - j. Keberagaman yaitu mementingkan semua pihak dan tidak diperkenankan mendiskriminasikan kelompok maupun suatu masyarakat tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- Partisipatif adalah asas yang melibatkan kelembagaan desa dan masyarakat desa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa (Purnomo, 2016).

B. Good Governance Sebagai Kerangka Teori

Tata kelola pemerintahan desa yaitu suatu upaya yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya tata kelola pemerintahan desa ini mampu membawa kesejahteraan masyarakat. Dan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya suatu model tata kelola yang mengatur pelaksanaan pemerintahan, maka *good governance* dipilih menjadi salah satu konsep yang diterapkan sebagai solusi guna mewujudkan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya mampu meningkatkan pembangunan sosial maupun ekonomi karena dalam konsep ini terdapat tiga hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, ketiga unsur tersebut harus mampu bersinergi dengan baik supaya dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Rosidi & Fajriani, 2013).

Penerapan prinsip *good governance* di Indonesia ini mulai diperkenalkan pada masa reformasi, yang mampu merubah pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi dengan menyerahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah guna mengatur urusan rumah tangganya sendiri, hal ini dimaksud supaya pemberian pelayanan kepada masyarakatnya dapat terlaksana secara lebih maksimal. Dan dalam pola desentralisasi ini pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk membangun keadaan yang stabil dalam menjembatani proses interaksi politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya *good governance* juga diharapkan mampu menarik lebih masyarakat untuk terlibat dalam setiap program pembangunan, hal ini dilakukan supaya proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan masyarakat mempunyai kehidupan yang lebih mandiri, terbuka dan berkualitas serta berkelanjutan (Solekhan, 2014).

Secara umum, makna *governance* itu sendiri diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengatur (*governing*) sektor publik maupun sektor swasta, sedangkan untuk *good governance* dimaknai sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* *governance* dimaknai sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme dan proses ketika masyarakat maupun lembaga-lembaga hendak mengutarakan aspirasi mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan hak hukum, serta menjadi penengah dari perbedaan-perbedaan diantara mereka. *United Nation Development Programme (UNDP)* Menjelaskan bahwa

ada 3 pilar yang harus dilibatkan dalam penyelenggaraan good governance, yaitu Negara/Pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan, pihak swasta sebagai penggerak aktifitas ekonomi, dan masyarakat sebagai obyek maupun subyek yang ikut berperan dalam pihak swasta dan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004).

Sedangkan menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) yang dikutip dalam Hetifa (2003), Good governance sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu :

1. Menjamin adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang efektif dan adil
2. Tersedianya aturan hukum
3. Menjamin adanya konsensus
4. Memperhatikan kepentingan seluruh elemen

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya beberapa prinsip yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam pemerintahan. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), ada sembilan prinsip good governance yang harus dijalankan, diantaranya yaitu :

1. Partisipasi, prinsip ini mengacu pada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam suatu pengambilan keputusan yang diambil secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan rakyat, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama.
2. Aturan hukum, dimana hukum ini menjadi kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dan di mata hukum, setiap masyarakat juga mempunyai kedudukan yang sama.
3. Transparansi, dibuktikan dengan keterbukaan informasi atas segala kegiatan yang dilakukan pemerintah dan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara umum.
4. Responsif, yang mana di setiap institusi harus mengarah pada usaha untuk memberikan pelayanan kepentingan berbagai *stakeholders*.
5. Bertujuan konsensus, berarti pemerintahan yang baik berperan menjadi penengah untuk setiap kepentingan yang tidak serupa supaya dapat tercapai kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak lain.

6. Berkeadilan, berarti pemerintahan yang baik selalu memberikan kesempatan yang baik pada seluruh masyarakatnya supaya dapat meningkatkan serta memelihara kualitas hidup masyarakat.
7. Efektivitas dan efisiensi, berarti semua kegiatan dituntun untuk menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada.
8. Akuntabilitas, berarti para penegak keputusan baik pemerintah maupun sektor swasta harus mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat umum.
9. Visi strategis, berarti pemerintah harus mempunyai wawasan yang luas dan berjangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (Pasolong, 2019).

Prinsip-prinsip *good governance* tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus saling menguatkan, dalam penelitian ini penulis berfokus pada 3 prinsip yang digunakan untuk melihat pemerintahan telah berjalan dengan baik atau belum, diantaranya yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu suatu tindakan pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh pemerintah atas semua kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas ini meliputi keuangan, administratif, dan kebijakan publik, hukum serta politik. Menurut UNDP, akuntabilitas yaitu evaluasi yang dilakukan pada proses pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan dan juga sebagai evaluasi bagi pimpinan organisasi supaya lebih mampu meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Menurut Sheila Elwood dalam Raba (2006), terdapat empat jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu :

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan

Akuntabilitas ini berkaitan dengan adanya ketaatan terhadap hukum mengenai penggunaan dana publik

- b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas yang berkaitan dengan tahap-tahap yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari adanya pelayanan yang cepat dan responsif.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas ini berkesinambungan dengan pertimbangan mengenai program yang akan dilaksanakan dan pembuatan opsi program lain yang dapat memberikan hasil secara optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pemerintah pusat maupun masyarakat

Indikator Prinsip Akuntabilitas

No	Indikator
1	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2	Adanya sanksi yang ditetapkan pada pelaksanaan kegiatan
3	Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan Negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	Berkurangnya kasus KKN

Sumber : (Sedarmayanti, 2004)

2. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan efektifitas pengelolaan sumber daya kepada masyarakat, prinsip transparansi ini menjamin adanya kebebasan bagi setiap individu guna mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan dan implementasi serta capaian hasilnya, dan transparansi ini juga mengutamakan pada aspek komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi (Kristianten, 2006). Menurut UNDP, pemerintah harus dibangun atas dasar keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang, hal ini dapat diukur dari seberapa mudahnya masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu dalam transparansi ini perlu adanya pembuatan sistem pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan apabila ada pihak pemerintah

yang melanggar peraturan, dan meningkatkan perjalanan informasi dengan cara bekerjasama dengan media online maupun lembaga non pemerintahan.

Indikator Prinsip Transparansi

No	Indikator
1	Tersedianya Informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, dan terbuka untuk masyarakat umum
3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Sumber : (Sedarmayanti, 2004)

3. Partisipasi

Menurut UNDP, partisipasi memiliki arti bahwa setiap warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak suara dan kebebasan untuk berpendapat, serta ikutserta dalam kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Prinsip partisipasi ini menjamin adanya pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikutserta dalam setiap pembuatan kebijakan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011), terdapat empat jenis partisipasi yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi jenis ini berkesinambungan dengan penentuan alternatif mengenai ide-ide terkait kepentingan bersama, dalam hal ini masyarakat ikut andil dalam memutuskan arah dan orientasi pembangunan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi jenis ini berkesinambungan dengan pelaksanaan dana, sumber daya, koordinasi, kegiatan administrasi dan penjabaran suatu program

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi jenis ini berkesinambungan dengan kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan suatu program yang telah dicapai.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi berkaitan dengan pembahasan mengenai berbagai masalah yang dialami dalam menjalankan seluruh program.

Indikator Prinsip Partisipasi

No	Indikator
1	Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kritik saran dari masyarakat
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Sumber : (Sedarmayanti, 2004)

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi dengan menggunakan ketiga prinsip tersebut karena untuk mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data dan analisis datanya serta ketiga prinsip tersebut juga saling berkaitan yang sudah mencakup mengenai pertanggungjawaban, transparansi dana, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang mana ketiga hal tersebut berpengaruh bagi berjalannya pembangunan desa. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana peran kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Dermaji, peneliti menggunakan 3 prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipasi untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga membuat desa tersebut menjadi desa yang maju.

BAB III

LANSCAPE DESA DERMAJI SEBAGAI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Dermaji

1. Kondisi Geografis

Gambaran umum pada kondisi geografis ini, peneliti memaparkan mengenai letak geografis dan luas wilayah dari Desa Dermaji

a. Letak Geografis

Desa Dermaji merupakan wilayah Kecamatan Lumbir yang terletak di bagian paling barat Kabupaten Banyumas. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan desa dengan pusat pemerintahan kecamatan yaitu 5Km, sedangkan jarak tempuh dari pusat pemerintahan desa ke ibukota kabupaten Banyumas yaitu 55Km. Desa Dermaji ini terdiri atas kawasan perbukitan, lembah dan dataran rendah, serta terdapat hutan pinus yang luas di bagian utara dan timur desa (Paramita, 2014). Desa Dermaji memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar
- Sebelah Selatan : Desa Lumbir Kecamatan Lumbir
- Sebelah Timur : Desa Pankingaban Kecamatan Gumelar
- Sebelah Barat : Desa Tayem Timur Kec. Karangpucung Kab. Cilacap

Desa Dermaji memiliki luas wilayah 1.302 Ha yang terbagi menjadi 2 dusun, yang mana dusun I dusun II ini letaknya berjauhan, dusun II letanya berjarak 4 Km dari kantor balades Dermaji. Kemudian dua dusun tersebut dibagi menjadi 7 RW dan 41 RT.

Secara visual, wilayah administrasi dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber :

<http://1.bp.blogspot.com/->

[U5ydXznxsak/VVuwgIBJHoI/AAAAAAAAAGI/ZPviiQRD5i4/s1600/Peta-27-kecamatan-di-banyumas.png](http://1.bp.blogspot.com/-U5ydXznxsak/VVuwgIBJHoI/AAAAAAAAAGI/ZPviiQRD5i4/s1600/Peta-27-kecamatan-di-banyumas.png). Diunduh pada tanggal 22 April 2022

Gambar 2. Peta Wilayah Lumbir



Sumber :

<https://1.bp.blogspot.com/->

[iDT8w5PmM9g/YOKCd4zPbdI/AAAAAAAAAPXw/9nxsE9VnoJsHzaeLChqr6](https://1.bp.blogspot.com/-iDT8w5PmM9g/YOKCd4zPbdI/AAAAAAAAAPXw/9nxsE9VnoJsHzaeLChqr6)

b. Luas Wilayah

Desa Dermaji memiliki luas wilayah sekitar 1.302 Ha yang terdiri dari tanah sawah 96 Ha, tanah pemukiman 31 Ha, tanah tegalan/kebun 649 Ha, tanah hutan 500 Ha, dan lainnya 26 Ha (Desa Dermaji, 2021).

Tabel 1. Luas Wilayah Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Tanah	Luas/Ha
1	Luas tanah sawah	96,00
2	Luas tanah pemukiman	31,00
3	Luas tanah tegalan/kebun	649,00
4	Luas fasilitas umum	26,00
5	Luas tanah hutan	500,00
Total		1.302

Sumber : Dokumen Desa Dermaji tahun 2021

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas tanah di Desa Dermaji adalah tanah tegalan/kebun dengan luas tanah 649,00 Ha..

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah penduduk secara keseluruhan

Jumlah penduduk di Desa Dermaji berdasarkan hasil pendataan penduduk pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 6.047 warga, yang terdiri dari 3.047 pria dan 3.000 wanita, serta tercatat ada sebanyak 2.103 Kepala Keluarga (KK), dengan 1.880 KK laki-laki dan 223 KK perempuan.

b. Jumlah penduduk secara usia

Berdasarkan data yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa di Desa Dermaji jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan usia.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (orang)
1	0-4	508
2	5-6	280
3	7-15	603
4	16-55	3.782
5	>56	874

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

c. Tingkat pendidikan

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Dermaji

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	1.266
2	Belum Tamat SD/Sederajat	495
3	Tamat SD/Sederajat	2.836
4	Tamat SMP/Sederajat	946
5	Tamat SMA/Sederajat	399
6	Tamat D-1	7
7	Tamat D-2	8
8	Tamat D-3	18
9	Tamat S-1	71
10	Tamat S-2	1
11	Tamat S-3	-

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

d. Jenis mata pencaharian

Masyarakat Desa Dermaji merupakan masyarakat majemuk yang mana masyarakatnya memiliki beraneka ragam jenis pekerjaan, dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian yang ada di Desa Dermaji :

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Desa Dermaji

NO	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	686	597	1.283
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	-	567	567
3	PELAJAR/MAHASISWA	301	260	561
4	PENSIUNAN	8	-	8
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	16	6	22
6	KEPOLISIAN RI	1	-	1
7	PERDAGANGAN	3	5	8
8	PETANI/PEKEBUN	1.132	1.139	2.271
9	PETERNAK	-	1	1
10	INDUSTRI	1	2	3
11	KARYAWAN SWASTA	323	113	436
12	KARYAWAN BUMN	11	-	11
13	KARYAWAN BUMD	1	-	1
14	KARYAWAN HONORER	2	-	2
15	BURUH HARIAN LEPAS	45	17	62
16	BURUH TANI/PERKEBUNAN	211	187	398
17	PEMBANTU RUMAH TANGGA	-	1	1
18	TUKANG BATU	5	-	5
19	TUKANG KAYU	3	-	3
20	TUKANG JAHIT	2	3	5
21	IMAM MESJID	1	-	1
22	WARTAWAN	1	-	1
23	GURU	21	22	43
24	KONSULTAN	-	1	1
25	BIDAN	-	2	2
26	PERAWAT	1	1	2
27	SOPIR	14	-	14
28	PEDAGANG	12	12	24

29	PERANGKAT DESA	9	3	12
30	KEPALA DESA	1	-	1
31	WIRASWASTA	236	61	297
32	LAINNYA			
JUMLAH		3.047	3.000	6.047

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Dermaji berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Dan mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Dermaji tidak dapat terlepas dari adanya aset kepemilikan tanah penduduk Desa Dermaji, masih ada sebagian masyarakat Desa Dermaji yang tidak memiliki tanah. Secara lebih rinci, aset kepemilikan tanah penduduk Desa Dermaji dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Aset Kepemilikan Tanah Desa Dermaji

No.	Aset Kepemilikan Tanah (ha)	Jumlah (ha)
1.	Tidak memiliki tanah	627
2.	Memiliki tanah kurang dari 0,1	364
3.	Memiliki tanah antara 0,1-0,2	370
4.	Memiliki tanah antara 0,21-0,3	325
5.	Memiliki tanah antara 0,31-0,4	314
6.	Memiliki tanah antara 0,41-0,5	67
7.	Memiliki tanah antara 0,51-0,6	60
8.	Memiliki tanah antara 0,61-0,7	62
9.	Memiliki tanah antara 0,71-0,8	70
10.	Memiliki tanah antara 0,81-0,9	63
11.	Memiliki tanah antara 0,91-1,0	54
12.	Memiliki tanah lebih dari 1,0	67

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

Selain sebagai buruh tani atau petani, sebagian besar masyarakat Desa Dermaji juga memiliki usaha ternak. Usaha ini dijadikan sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan masyarakat. Usaha ternak yang menjadi unggulan di Desa Dermaji yaitu peternakan kambing. Usaha ternak kambing ini sangat cocok dikembangkan di Desa Dermaji

karena iklimnya yang cocok dan adanya ketersediaan pakan (Desa Dermaji, 2021). Kepemilikan ternak penduduk Desa Dermaji dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 6. Jumlah Kepemilikan Ternak Penduduk Desa Dermaji

No.	Kepemilikan Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Sapi	10
2.	Kerbau	6
3.	Ayam	5.787
4.	Bebek/Entog	196
5.	Kambing	3.256

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Dermaji dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Desa

No	Jenis Prasarana	Jumlah (unit)
A.	Pemerintahan	
	1. Kantor Desa	1
B.	Pendidikan	
	1. Taman Kanak-kanak (TK)	3
	2. Sekolah Dasar (SD)	3
	3. SMP Negeri	1
C.	Kesehatan	
	1. Puskesmas Pembantu	1
	2. PKD	1
	3. Posyandu	7
D.	Sosial	
	1. Masjid	3
	2. Mushola	26

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

Desa Dermaji juga memiliki beberapa ruas jalan utama yang sangat penting keberadaannya bagi masyarakat. Ruas jalan tersebut diantaranya yaitu :

Tabel 8. Daftar Ruas Jalan Utama Desa Dermaji

No.	Nama Jalan	Volume		Keterangan
		Panjang	Lebar	
1.	Jalan Kedunggede - Dermaji - Paningkaban	6.000	4	Jalan Kabupaten
2.	Jalan Dermaji - Tayem Timur (Kabupaten Cilacap)	700	4	Jalan Kabupaten
3.	Jalan Karanggedang (Dermaji) - Ciuyah (Cihonje)	800	3	Jalan Kabupaten
4.	Jalan Dermaji - Citunggul	1.750	3,5	Jalan Kabupaten
5.	Jalan Utama Dusun II (Sirongge - Citunggul - Pangkalan)	4.200	3	Jalan Kabupaten
6.	Jalan Pangkalan - Cimencos (Tayem Timur, Cilacap)	750	2,5	Jalan Desa
7.	Jalan Alternatif Dermaji - Paningkaban (Jalan Karangjati)	1.100	3,5	Jalan Desa
8.	Jalan Alternatif Dermaji - Sirongge	800	3	Jalan Desa
9.	Jalan Lingkar Ciposing (Jalan Menuju SMP N 3 Lumbir)	700	2,5	Jalan Desa
10.	Jalan Karangduren - Karangsegon	850	3	Jalan Desa
11.	Jalan Grumbul Karanggedang	300	3	Jalan Lingkungan
12.	Jalan Menuju Pemakaman Baru	200	2	Jalan Lingkungan
13.	Jalan Pangkalan - Ciwaru	1.500	3	Jalan Desa
14.	Jalan Ciposing - Ciwalen	650	2,5	Jalan Lingkungan
15.	Jalan Citunggul - Ciwaru	400	2,5	Jalan Antar Kecamatan
16.	Jalan Grumbul Lenggorak	150	2,5	Jalan Lingkungan
17.	Jalan Karangsegon - Karangjengkol (Cihonje)	700	2	Jalan Antar Kecamatan
18.	Jalan Cimencos - Curug Welaok	750	2,5	Jalan Lingkungan

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

B. Profil Desa Dermaji

Gambar 3. Kantor Balaidesa Dermaji



Sumber : Dokumen Pribadi

➤ Visi

Mewujudkan Dermaji yang Mandiri, Maju dan Berkarakter Budaya Bangsa

➤ Misi

1. Meningkatkan dan memantapkan sistem perencanaan pembangunan desa melalui pengoptimalan mekanisme musyawarah pembangunan desa dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada.
2. Membuat skala prioritas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Meningkatkan kemampuan serta peran serta aktif masyarakat dalam mengelola pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga (*capacity building*) yang ada di desa untuk lebih mendinamisasi dan mendukung seluruh proses pembangunan.

5. Membina dan memantapkan kehidupan gotong royong sebagai basis dan modal dasar pembangunan desa, yang pada hakikatnya juga merupakan karakter dasar dari masyarakat desa dan juga bangsa Indonesia.

1. Sejarah Desa Dermaji

Tidak ada sumber primer, baik berupa prasasti maupun naskah tertulis yang menjelaskan sejarah awal keberadaan Desa Dermaji. Sejarah Desa Dermaji ini hanya dipahami melalui cerita lisan yang disampaikan secara turun temurun dari generasi, dan dari cerita-cerita tersebut diyakini bahwa Desa Dermaji termasuk salah satu desa yang keberadaannya sudah cukup tua. Desa Dermaji diperkirakan sudah ada sejak masa-masa berdirinya Kerajaan Galuh Jawa barat yaitu pada abad ke-6. Kehidupan masyarakat Desa Dermaji juga tidak terlepas dari pengaruh budaya sunda karena masuk dalam wilayah Kerajaan Galuh yang berbudaya sunda. Pengaruh dari budaya sunda ini dapat dilihat dari bahasa yang dipakai oleh warga Desa Dermaji, hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Guru Besar Ilmu Linguistik Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Prof. Dr. Cece Sobarna pada tahun 1989, beliau menyatakan bahwa bahasa Sunda pernah menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Dermaji, salah satu contohnya yaitu dari penamaan tempat dan sungai seperti Cireang, Cukangawi, Cipancur, Citunggul, Cipeundeuy, Cibrewek ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kuat bahasa sunda di Desa Dermaji. Cerita lain juga menyebutkan bahwa sebelum dihuni oleh manusia, Desa Dermaji berwujud hutan belantara yang dihuni oleh binatang buas, jin, dan siluman. Kemudian para leluhur Desa Dermaji seperti Mbah Damarwulan, Mbah Panusupan, Mbah Jayasengara berhasil mengusir jin dan siluman jahat tersebut sehingga Desa Dermaji dapat dihuni oleh manusia hingga sekarang ini (Sejarah Desa Dermaji, 2015).

Warga Desa Dermaji juga memiliki leluhur yang dikenal dengan nama Mbah Darmokusumo. Mbah Darmokusumo ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki tingkat kejujuran dan kepasrahan yang tinggi kepada Sang Maha Kuasa. Bagi warga Desa Dermaji, sosok Mbah Darmokusumo ini menjadi sosok yang dibanggakan karena memiliki banyak keutamaan-keutamaan dalam perilakunya, sehingga sosok Mbah Darmokusumo ini

seringkali dikaitkan dengan asal-usul nama Dermaji. DERMA berarti memberi, dan AJI berarti sesuatu yang berharga, yang mana Dermaji ini diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada sesama secara terus-menerus. Cerita lain juga menyebutkan bahwa sebelum masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas, Desa Dermaji ini awalnya masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Cilacap, namun belum ditemukan secara pasti sejarah masa-masa menjadi bagian Kabupaten Cilacap dan kapan mulai masuk wilayah Kabupaten Banyumas. Sejarah yang dapat ditemukan hanyalah sejak awal adanya Desa Dermajii hingga sekarang, Desa ini telah dipimpin oleh 11 Kepala Desa (Sejarah Desa Dermaji, 2015).

Berdasarkan catatan dari Alm. Mbah Ruswadi salah satu putra Singamenggala (Lurah Dermaji 1935-1945), sejak adanya Desa Dermaji hingga sekarang, Desa Dermaji telah dipimpin oleh 11 Kepala Desa, diantaranya yaitu :

- a. Naladipa
- b. Jayan
- c. Singamedja
- d. Atmareja
- e. Widyadikrama
- f. Singamenggala (1935-1945)
- g. Hardjosoewito (1945-1988)
- h. Kuswanto, S.Sos., M.Si (1989-2004)
- i. Bayu Setyo Nugroho S.Sos., M.Si (2005 - sekarang)

Dan dari 11 Kepala Desa tersebut, pembangunan mulai berjalan pada era Hardjosoewito, pada masa kepemimpinan beliau sudah mulai ada pembangunan di bidang pendidikan yaitu dengan dibangunnya SD Negeri 1, SD Negeri 3 di dekat balai desa dan SD Negeri 2 di wilayah Grumbul Citunggul. Kemudian juga membangun kantor Balai Desa dan Puskesmas pembantu, serta pembuatan lapangan sepakbola, dan selanjutnya pada tahun 1984 listrik mulai masuk di Desa Dermaji (Sejarah Desa Dermaji, 2015). selanjutnya pada masa kepemimpinan Kuswanto, pembangunan lebih diarahkan pada bidang infrastruktur jalan seperti pengaspalan Jalan Kedunggede-Dermaji, pengaspalan Jalan Karangjambu-Dermaji, pengaspalan Jalan Dermaji-Cireang, pengaspalan Jalan Grumbul Karangduren melalui

PPK, pengerasan Jalan Dermaji-Igir Citunggul melalui P3DT, pengerasan Jalan Pangkalan-Citunggul melalui PPK, pengerasan Jalan Dermaji-Tayem (jalan jemblongan) sepanjang 600 meter dan lebar 3 meter melalui PPK. Kemudian juga melakukan rehab total pada kantor Balai Desa, pembangunan SD Negeri 4 dan SD Negeri 5 yang kemudian re-grouping dengan SD Negeri 1, serta ada pembangunan prasarana air bersih dan pembangunan Masjid Al-Fatah (Sejarah Desa Dermaji, 2015).

Selanjutnya pada masa kepemimpinan kepala desa saat ini yaitu Bayu Setyo Nugroho, beliau sudah menduduki jabatan sebagai kepala desa di desa Dermaji selama 3 periode yaitu sejak 2005 hingga saat ini. Beliau adalah seorang yang berpendidikan sarjana S2 ilmu pemerintahan, yang mana berdasarkan latar belakang pendidikannya, sudah dapat dipastikan bahwa beliau paham mengenai bagaimana mengelola pemerintahan yang baik. Sejak kepemimpinan beliau, desa Dermaji menjadi semakin maju, pembangunannya semakin berkembang dengan cepat karena adanya semangat dan partisipasi yang tinggi dari seluruh elemen yang ada di desa serta didukung dengan sifat gotong royong yang masih kuat dalam masyarakat. Pada masa ini, pembangunan telah dilakukan melalui berbagai macam pendanaan, mulai dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dana lainnya.

Pada masa kepemimpinan Bayu Setyo Nugroho ini juga Desa Dermaji mulai dikenal oleh publik dan mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Sikompak Award 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah, penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Dermaji, kemudian juga mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 7 desa unggulan tempo tahun 2016 yang diberikan oleh Tempo Media Group dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga mendapat penghargaan DesTIKA desa.id Awards 2016 dalam festival DesTIKA ke-4 di Kabupaten Jayapura Papua, penghargaan ini diberikan karena Desa Dermaji telah menjadi desa pelopor dalam publikasi daring memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta domain internet khusus desa yaitu desa.id. Pada bidang

kebersihan dan kesehatan, Desa Dermaji juga mendapatkan sertifikat ODF yaitu bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa yang dinyatakan bebas dari adanya buang air besar sembarangan. Kemudian Kepala Desa Dermaji juga mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Menginspirasi (*Inspiring Young Leader*) dari portal berita Beritasatu.com (Sejarah Desa Dermaji, 2015).

Kepala desa Dermaji saat ini juga mampu membangun kepercayaan masyarakat hal ini dibuktikan dari lamanya masa jabatan beliau, dan dalam membangun kepercayaan masyarakat, upaya yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan cara memberikan kesempatan pada mereka untuk ikutandil dalam perencanaan pembangunan desa, beliau membuat ruang-ruang diskusi bagi semua lembaga maupun kelompok masyarakat yang ada di Desa Dermaji, beliau juga turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat kemudian dibuktikan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan serta mengimplementasikannya. Hal inilah yang menjadikan beliau diberikan kepercayaan oleh masyarakat, selain karena latarbelakang pendidikannya, juga karena pemikiran dan kemampuan beliau dalam mengayomi dan memberi arahan pada setiap warganya serta mau terjun langsung ke masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Kelembagaan Desa

Desa Dermaji mempunyai berbagai macam kelembagaan, baik lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sangat penting karena digunakan sebagai sarana untuk percepatan pembangunan desa (Sejarah Desa Dermaji, 2015). Secara lebih lengkap kelembagaan yang ada di Desa Dermaji dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 9. Kelembagaan Desa Dermaji

No.	Jenis Kelembagaan Desa	Jumlah Anggota (orang)
1.	Pemerintah Desa	11
2.	Badan Perwakilan Desa (BPD)	9
3.	Rukun Warga (RW)	7

4.	Rukun Tetangga (RT)	41
5.	PKK	650
6.	Karang Taruna	380
7.	Kelompok Tani	120
8.	LPMD	17
9.	LMDH	298

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

3. Bagan dan Struktur Pemerintahan Desa Dermaji

Tabel 10. Susunan Pemerintahan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Bayu Setyo Nugroho,S.Sos.,M.Si	Kepala Desa
2	Harry Haryono	Sekretaris Desa
3	Seun Heru Susanto	Kadus I
4	Sarjo	Kadus II
5	Supriyanto, S.H	Kasi Pemerintahan
6	Nasikin	Kasi Kesejahteraan
7	Wiyono	Kasi Pelayanan
8	Fitri Yoeliani	Kaur Keuangan
9	Andi wibowo	Kaur Umum dan Tata Usaha
10	Wiji Setya Utami	Kaur Perencanaan
11	Defi Riyani	Staf Keuangan

Sumber : Sekretaris Desa Dermaji

4. Potensi Pengembangan Masyarakat

a. Bidang Pendidikan

Di Desa Dermaji ada berbagai lembaga pendidikan diantaranya yaitu Paud, Sekolah Dasar dan SMP. Adapun potensi masing-masing lembaga pendidikan tersebut, adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Jumlah Tutor dan Siswa Paud Desa Dermaji 2020/2021

No.	Nama Pos Paud	Jumlah Tutor	Jumlah Siswa
1.	Rahayu	5	18
2.	Sri Rejeki	4	13

3.	Larasati	4	17
4.	Sari Asih	4	14
5.	Tunas Harapan	4	13
6.	Melati	3	14
7.	Mear Sari	3	12

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

Tabel 12. Jumlah Guru dan Siswa TK Desa Dermaji 2020/2021

No.	Nama TK	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1.	Pertiwi Dermaji 1	3	18
2.	Pertiwi Dermaji 2	3	11
3.	Pertiwi Dermaji 3	2	9

Sumber: Dokumen Desa Dermaji 2021

Tabel 13. Jumlah Siswa SD Desa Dermaji 2020/2021

No.	Nama SD	Jumlah Guru		Jumlah Siswa
		PNS	Non PNS	
1.	SD N 1 Dermaji	5	4	137
2.	SD N 2 Dermaji	6	4	167
3.	SD N 3 Dermaji	6	4	106

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

Tabel 14. Jumlah Siswa SMPN 3 Lumbir di Desa Dermaji 2020/2021

No.	Nama SMP	Jumlah Guru		Jumlah Siswa
		PNS	Non PNS	
1.	SMP N 3 Lumbir	3	4	90

Sumber :Dokumen Desa Dermaji 2021

b. Bidang Ekonomi

Masyarakat Desa Dermaji mempunyai beraneka ragam jenis usaha yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun potensi ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Potensi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dermaji

No.	Jenis Usaha Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga
1.	Industri Pengolahan Tepung Tapioka	8
2.	Industri Pengolahan Makanan Kecil	21
3.	Pedagang Kelontong	69
4.	Pedagang Hasil Bumi	25
5.	Bengkel	4
6.	Usaha Jasa Potong Rambut	2
7.	Usaha Foto Copy	1
8.	Penyadap Getah Pinus	395
9.	Penderes Gula Kelapa	38

Sumber : Dokumen Desa Dermaji 2021

C. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik dan mampu merubah kondisi desa serta membawa kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa juga harus menyediakan adanya pembagian tugas bagi masing-masing perangkat sesuai dengan tupoksinya, disiplin kerja dan tepat waktu kerja, menyediakan pelayanan yang cepat, saling gotong-royong antar perangkat desa.

Dari uraian diatas, pelayanan kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Dermaji diantara lain yaitu :

1. Pengolahan Data Penduduk
 - a. Buku Induk Penduduk
 - b. Buku lahir, mati, datang dan pindah
 - c. Buku kelompok umur
 - d. Buku induk kepala keluarga
 - e. Pengarsipan kartu keluarga dan permohonan KTP
 - f. Pelayanan dengan aplikasi Smard Dindukcapil.
2. Pelayanan tentang Administrasi Penduduk
 - a. Melayani pembuatan KTP/KK bagi masyarakat yang membutuhkan
 - b. Melayani permintaan surat pindah, kelahiran, kematian dan proses bagi pendatang baru

- c. Melayani surat domisili, SKCK, Surat jalan dan lain-lain.
3. Penyuluhan tentang penduduk di lingkungan RT dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui :
 - a. Pembaharuan KTP/KK dengan system E-KTP
 - b. Penduduk wajib mempunyai KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun/sudah menikah.
 - c. Setiap warga yang membutuhkan surat-surat diwajibkan untuk membawa surat pengantar dari RT.
 - d. Setiap anggota keluarga yang mengalami perubahan untuk segera melaporkan diri.
 - e. Setiap warga wajib memiliki E-KTP
 4. Bidang Pertanahan
 - a. Mengadakan sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Memberikan fasilitas sertifikasi tanah bagi masyarakat kurang mampu
 - c. Melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Menentukan pembangunan batas atau patok Tanah Desa
 - e. Mengadakan pelelangan tanah kas desa
 - f. Operasional intensifikasi PBB
 - g. Menyediakan fasilitas kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
 5. Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Menyalurkan Kartu KIS, KIP dan KKS.
 - b. Menyalurkan bantuan pemerintah mengenai Makanan Tambahan bagi Balita yang Gizi buruk dan Gizi Kurang.
 - c. Membantu Masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk keringanan biaya pengobatan atau pendidikan.
 - d. Melaksanakan pembuatan akte kelahiran.
 6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyelenggarakan pos kesehatan desa
 - b. Penyediaan posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja
 - c. Memantau dan melakukan sosialisasi mengenai dampak penggunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa
 - d. Pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga

- e. Fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
 - f. Mengadakan kegiatan donor darah di kantor balaidesa
7. Bidang Pendidikan
- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah di Desa
 - b. Pelatihan peningkatan KIM
 - c. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan air bersih
 - d. Pengelolaan Museum “Naladipa”
 - e. Pengelolaan perpustakaan Desa
 - f. Pembinaan sanggar seni dan belajar
 - g. Pembinaan anak sekolah melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
8. Bidang Infastruktur
- a. Pemeliharaan jalan desa
 - b. Pemeliharaan jembatan milik desa
 - c. Pemeliharaan prasarana jalan desa
 - d. Pemeliharaan embung desa
 - e. Pembangunan gapura kampung KB Munggang Wungu
 - f. Pengerasan jalan desa
 - g. Peningkatan prasarana jalan desa
 - h. Pembuatan peta wilyaha dan sosial desa
 - i. Pembangunan gedung balai pertemuan kemasyarakatan
 - j. Pembuatan rambu-rambu jalan desa
 - k. Pembuatan terasering pada daerah rawan longsor milik desa
9. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda
 - b. Penyelenggaraan festival kepemudaan dan olahraga tingkat desa (Pordes)
 - c. Pembentukan klub bola voli desa
 - d. Peningkatan sarana prasarana lapangan voli kedawung
 - e. Pembangunan tembok keliling selatan lapangan bola kubang aji
10. Bidang Ekonomi
- a. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengembangan sarana prasarana UMKM dan Koperasi
 - c. Penyelenggaraan pameran produk desa

- d. Pembentukan BUMDes
- e. Pelatihan pengelolaan BUMDes
- f. Pemeliharaan pasar milik desa
- g. Pelatihan usaha ekonomi produktif

Dalam tata kelola pemerintahan, Kepala Desa Dermaji juga memiliki empat strategi utama yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya yaitu menguatkan partisipasi masyarakat, pengembangan jaringan kolaboratif, pendekatan manajemen pengetahuan, dan pengembangan sistem informasi desa.

1. Penguatan partisipasi masyarakat

Dalam hal ini, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, desa Dermaji menggunakan tokoh-tokoh sesepuh desa supaya masyarakat bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa. Partisipasi masyarakat ini telah terlihat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sebelum melakukan rapat Musyawarah Desa terlebih dahulu masing-masing dusun melakukan musyawarah yang dinamakan dengan Musdus (Musyawarah Dusun), yang mana dalam musdus tersebut dihadiri oleh perwakilan RT, perwakilan kelompok ternak dan tani di Desa, kalangan masyarakat kurang mampu, unsur PKK, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, BDP, dan perwakilan dari perangkat desa. Kemudian hasil Musdus tersebut dibawa ke Musrenbangdesa.

2. Pengembangan jaringan kolaboratif

Desa Dermaji melakukan kolaborasi dengan BUMDes dan Perhutani untuk membangun wisata desa yaitu curug wanasuta. Desa Dermaji juga berkolaborasi dengan universitas-universitas seperti universitas jendral soedirman (Unsoed) untuk mengadakan sosialisasi maupun penelitian di Desa.

3. Pendekatan manajemen pengetahuan

Pembangunan perpustakaan desa dan museum desa supaya dapat dijadikan tempat bagi masyarakat terutama anak-anak desa dermaji yang masih sekolah agar mereka tidak kesulitan mencari buku untuk belajar dan juga dengan adanya museum ini dapat digunakan supaya mereka mengetahui mengenai sejarah desa dermaji

4. Pengembangan sistem informasi desa

Memfaatkan teknologi informasi melalui web desa maupun media sosial yang dimiliki desa, desa selalu update dilaman tersebut mengenai informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa, bahkan mengenai dana desa pun di update dalam web tersebut supaya masyarakat mengetahui dana-dana tersebut dialokasikan kemana dan web tersebut juga dapat diakses dengan mudah.

BAB IV

PERAN KEPALA DESA DERMAJI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Kemudian selain menjalankan tugas dan kewenangannya, kepala desa juga wajib menyampaikan laporan kepada warga mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dalam mewujudkan *good governance*, adanya peran dari kepala desa beserta para perangkatnya sangatlah penting terutama peran dari kepala desanya sendiri karena kepala desa diharapkan mampu menjadi panutan bagi masyarakat desa serta mampu membawa pemerintahan desa semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Adanya peran kepala desa melalui interaksi dan komunikasi secara intens dengan masyarakat desanya mampu menambah pemahamannya mengenai apa saja yang diperlukan oleh warga desanya dan warga menjadi merasa diberi perhatian oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana tugas kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa, peneliti menggunakan teori prinsip-prinsip *good governance* sebagai dasar teori untuk menganalisis peran kepala desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam hal ini peneliti berfokus pada tiga prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipasi.

Ketika kepala desa memiliki kecakapan dalam memimpin dan mampu melaksanakan tugas dan wewenangannya maka tidak dapat dipungkiri akan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, yang mampu mensejahterakan masyarakat desanya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Dermaji, di bawah kepemimpinan Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, berbagai inovasi tata kelola pemerintahan telah berjalan dan memperoleh berbagai prestasi di skala lokal maupun nasional sehingga mampu membawa Desa Dermaji ini dikenal oleh publik. Semua prestasi tersebut tidak terlepas dari adanya peran kepala desa yang mampu mengelola pemerintahannya dengan model tata kelola yang berbasis pada *good governance*. Dalam kesempatan wawancara bersama Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, beliau menjelaskan bagaimana proses awal dalam mengelola pemerintahan desa, yang mana sebelumnya desa Dermaji ini masih

tergolong desa terisolir, masih banyak yang harus dibenahi seperti pemanfaatan sumber daya yang belum dilakukan secara optimal.

“pas awal saya menjadi kepala desa disini, sebelum membuat program untuk pembangunan desa, saya sering berkeliling ke setiap dusun yang ada di desa, saya bertanya pada orang-orang yang saya temui di jalan sama orang-orang yang lagi kerja di sawah, saya bertanya pada mereka apa kepengenan mereka, mereka kepengen desa dermaji ini jadi desa yang bagaimana, setelah berkeliling itu saya langsung nulis kepengenan-kepengenan yang tadi mereka sampaikan, trus nanti saya diskusikan dengan para perangkat desa. Kemudian ketika pembuatan RPJMDesa saya juga mengundang dari masing-masing RW dan perwakilan dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang terdapat di desa ini untuk ikut berpartisipasi. Saya pengen pemerintahan ini ya berjalan secara terbuka, saya memberikan kesempatan pada warga untuk bebas berpendapat memberikan kritik saran tentang pembangunan desa. Saya juga membuat website desa, youtube desa, dan facebook desa biar warga desa pada tau kegiatan apa aja yang dilakukan di desa” (Wawancara dengan kepala desa, 7 Februari 2022)

Dari data yang didapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, melakukan interaksi secara intens dengan masyarakat, kemudian juga membuat sosial media desa sebagai wadah informasi untuk masyarakat yang menetap di desa ataupun masyarakat yang sedang merantau supaya mereka mengetahui kegiatan yang ada di desa dermaji. Berikut analisis peran kepala desa dalam mengelola pemerintahan menggunakan model tata kelola pemerintah berbasis *good governance*.

A. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana upaya kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bagaimana pelaporan pertanggungjawaban kepala desa terhadap masyarakat.

Menurut UNDP, akuntabilitas yaitu evaluasi yang dilakukan pada proses pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk bisa dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan organisasi agar dapat meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Secara sederhana, dalam penelitian

ini akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa.

Prinsip akuntabilitas ini mewajibkan semua pelaksanaan tugas serta hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara jujur disertai dengan data-data pendukung yang lengkap. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam realisasi APBDes yaitu melalui laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa pada setiap akhir tahun. Dan untuk mewujudkan terciptanya akuntabilitas diperlukan adanya transparansi dari semua realisasi penggunaan APBDes yang harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa Dermaji merujuk pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.

Pada prinsip akuntabilitas ini terdapat 4 indikator yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

Dalam setiap instansi pemerintahan maupun non pemerintahan pasti ada Prosedur pelayanan atau yang biasa disebut dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), SOP ini digunakan untuk menjaga serta memaksimalkan hasil dari produk atau jasa yang dibuat oleh pihak instansi. Seperti halnya yang terjadi di Desa Dermaji, prosedur pelaksanaan tata pemerintahan di Desa Dermaji memiliki fungsi untuk menjaga dan menelaraskan produk berupa tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk menganalisis apakah pihak pemerintah desa terutama kepala desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan dengan standar prosedur pelaksanaan yang berlaku.

Penerapan prosedur pelaksanaan yang digunakan oleh pemerintah Desa Dermaji merujuk pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, kewenangan, kewajiban dan hak kepala desa beserta perangkatnya. Pada

peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban kepala desa, salah satunya yaitu menerapkan prinsip pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) kepala desa juga mempunyai tanggungjawab untuk memimpin dan melakukan koordinasi terhadap bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas perangkat desa beserta isinya.

Dalam memberikan bimbingan pada perangkat desa mengenai tugasnya, kepala desa membuat peraturan Perdes Dermaji Nomor 3 Tahun 2016 mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai disiplin waktu serta tugas dan kewajiban masing-masing perangkat desa. Dalam kesempatan wawancara dengan bapak Harry Haryono selaku Sekretaris Desa menyampaikan sebagai berikut :

“dalam menjalankan pemerintahan ini, pak bayu selalu melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa, beliau juga membimbing kami untuk terus berkembang dan berbenah demi kemajuan desa dermaji” (Wawancara dengan Harry Haryono, 24 Maret 2022)

Demikian juga seperti yang disampaikan oleh Sutrisno selaku BPD Desa Dermaji, beliau menyampaikan bahwa :

“menurut saya, pak bayu ini dalam menjalankan pemerintahan ini sudah sesuai dengan SOP kepala desa ya mba, karena beliau ini bisa mengayomi masyarakatnya, trus beliau juga bisa jadi panutan buat perangkat desa disini, beliau nggak cuma nyuruh-nyuruh tok tapi beliau juga ikut turun tangan ke lapangan” (Wawancara dengan Sutrisno, 30 Maret 2022)

Kepala desa Dermaji selalu hadir di kantor balaidesa, serta ketika tidak ada kepentingan diluar desa, beliau juga selalu hadir di rapat-rapat yang diadakan oleh pihak desa ataupun hadir di kegiatan kemasyarakatan yang diadakan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Fitri Yoeliani selaku warga desa Dermaji, sebagai berikut :

“pak kades ini selalu hadir, selalu memantau ketika ada kegiatan di desa, contohe pas ada kegiatan donor darah kemarin itu di balaidesa, beliau ya ada disitu, trus pas ada kegiatan keagamaan kaya misalnya rutinan manaqiban di masjid ya pak kades menyempatkan hadir. Menurut saya pak bayu ini orangnya enakan lah mba, jadi ya warga ngga pada takut sama beliau” (Wawancara dengan Fitri Yoeliani, 24 Maret 2022)

Dari data tersebut diatas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan peranannya, kepala desa telah melakukan sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan, kepala desa juga mampu menjadi contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakatnya.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan

Indikator ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sanksi yang didapatkan oleh Kepala Desa apabila lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta bagaimana sanksi yang diterapkan oleh Kepala Desa pada Perangkat Desa ketika mereka juga lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Sanksi yang diterapkan di Desa Dermaji merujuk pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016, yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepala desa yang tidak melakukan kewajibannya dalam membuat laporan, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan maupun tertulis. Apabila telah mendapat teguran namun tidak ada perubahan, maka akan ditindaklanjuti dengan cara pemberhentian sementara, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian selamanya, oleh karena itu dengan adanya peraturan tersebut diharapkan adanya pelaporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa dan dilakukan dengan tertib kepada pihak publik dan pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya, kepala desa sudah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini disampaikan oleh Sutrisno selaku BPD, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“pak kades sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan mba, beliau juga melaporkan hasil realisasi APBDes secara terbuka pada kami BPD juga pada masyarakat” (Wawancara dengan Sutrisno, 30 Maret 2022)

Selanjutnya mengenai sanksi bagi perangkat desa yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya juga telah diatur dalam Perbup Banyumas Nomor 26 Tahun 2016, dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi yang dikenakan berupa teguran tertulis dari kepala desa sebanyak tiga kali teguran, apabila setelah teguran ketiga tidak menunjukkan perubahan yang baik, maka kepala desa berhak untuk memberhentikan perangkat desa tersebut. Dan peraturan lain juga disebutkan dalam Perdes Nomor 3 Tahun 2016 mengenai tupoksi perangkat desa. Di Desa Dermaji ini, kepala desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa juga dapat dijadikan panutan bagi perangkat desa, dalam wawancara dengan Harry Haryono selaku Sekretaris Desa, beliau menyampaikan bahwa :

“pak bayu selalu hadir tepat waktu di balaidesa, beliau jam 8 pagi itu udah ada disini, sedangkan kami (perangkat desa) kadang ada yang berangkat jam setengah 9 atau jam 9an, tapi pak bayu tidak menegur kita, tapi ya kita sadar diri lh mba, jadi ya kita besok-besok berangkatnya ngga terlalu kesiangan” (Wawancara dengan Harry Haryono, 24 Maret 2022)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa memang telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik, beliau bisa menjadi contoh bagi perangkat desanya, namun dalam memberikan sanksi kepada perangkat desa kurang tegas karena beliau tidak memberikan teguran secara langsung pada perangkat desa yang tidak datang di balaidesa tepat waktu sesuai dengan SOP yang berlaku di desa.

3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban

Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dermaji ini juga merujuk pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah desa, dimana dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa kepala desa wajib membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah desa pada masyarakat.

Pemerintah desa harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayahnya. Pemerintah Desa juga dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan pada masyarakat, kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara jelas dan terbuka pada masyarakat, dari mulai rincian anggarannya hingga realisasinya. Dalam kesempatan wawancara dengan bapak Harry Haryono selaku Sekretaris Desa, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“sebagai seorang pemimpin, pak bayu ini selalu mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Dermaji, trus beliau juga menekankan pada kita kalo semua kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan yang ada di anggaran” (Wawancara dengan Harry Haryono, 24 Maret 2022)

Kepala desa mengadakan rapat pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka, selain dihadiri oleh perwakilan dari pihak kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa, pihak pemerintah desa juga mengundang ketua RT dan RW dari masing-masing dusun, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat yang ada di desa, masing-masing stakeholder di desa ikutserta dalam acara tersebut. Dan

masyarakat juga antusias dalam mengikuti acara tersebut, dalam kesempatan wawancara dengan Harry Haryono selaku Sekretaris Desa Dermaji, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“dalam rapat penyampaian APBDes ini kita mengundang masyarakat desa, dan mereka ini sreg banget datang trus mengikuti rapat tersebut nyampe selesai, kan ada nih di suatu desa yang partisipannya nggak ngikuti nyampe akhir, tapi di desa dermaji ini alhamdulillah warganya mau mengikuti rangkaian acara nyampe selesai”
(Wawancara dengan Harry Haryono, 24 Maret 2022)

Dalam rapat tersebut, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi APBDes secara rinci dan jelas, dari mulai jumlah APBDes hingga jumlah dana yang digunakan oleh desa. Hal ini disampaikan oleh bapak Wasito selaku ketua BUMDes sebagai berikut :

“dalam rapat penyampaian realisasi APBDes kemarin itu pak kades benar-benar nyampaikan pada kami itu secara jelas dan rinci banget mba, dari mulai dana yang masuk itu berapa trus pengeluarannya berapa, trus pak kades juga menyampaikan kenapa penghasilan desanya berkurang, kenapa ada kegiatan yang ngga terealisasi, itu semua disampaikan dengan jelas mba, jadi kita yang dengerin juga langsung paham, apalagi kan pas dulu pembuatan RPJMDes itu kita dilibatkan, jadi ya tau itu laporannya sesuai apa engga gitu mba” (Wawancara dengan Wasito, 30 Maret 2022)

Gambar 4. Laporan Pertanggungjawaban APBDes 2021



**KEPALA DESA DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

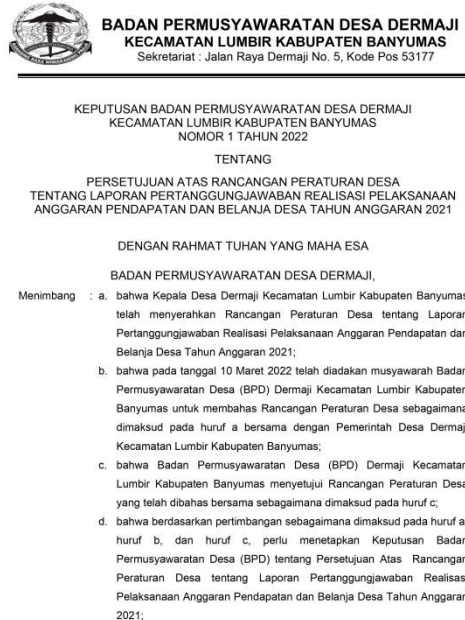
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERMAJI,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, hasil laporan pertanggungjawaban tersebut disepakati bersama dan diterima dengan bukti Surat Keputusan (SK) dari BPD selaku lembaga yang mewakili masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa. Dalam SK tersebut tertuliskan bahwa BPD telah menerima hasil laporan pertanggungjawaban kepala desa mengenai RKP dan realisasi APBDes, yang mana laporan tersebut telah sesuai dengan yang dijalankan.

Gambar 5. Surat Keputusan BPD



Kemudian setelah acara tersebut selesai, pihak pemerintah desa juga membuat laporan berita untuk di upload di website desa supaya seluruh masyarakat desa yang tinggal di Desa Dermaji maupun yang sedang merantau di luar Desa Dermaji mengetahuinya, seperti yang disampaikan oleh Harry Haryono selaku Sekretaris Desa Dermaji sebagai berikut :

“jadi gini mba, buat masyarakat yang belum bisa hadir di rapat itu apa masyarakat yang lagi ngrantau di luar gitu ya, biar mereka tau berapa dana desa di Dermaji, ya kita abis rapat laporan realisasi APBDes atau rapat pembuatan kebijakan lain itu kita buat berita acara bahwa rapat di Desa Dermaji sudah dilaksanakan dan seterusnya, gitu sih mba” (Wawancara dengan Harry Haryono, 24 Maret 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam indikator pembuatan laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara baik, Kepala Desa menyampaikan laporannya secara

jelas kepada khalayak publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016, yaitu menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban secara jelas kepada masyarakat desanya melalui tulisan maupun media informasi yang mudah di akses masyarakat, hasil laporan pertanggungjawaban tersebut juga telah diterima dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Berkurangnya praktik KKN

Dalam hal mengurangi adanya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), kepala desa menghimbau para perangkat desa untuk tidak melakukan korupsi atau hal semacamnya yang dapat merugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pihak pemerintah desa karena hal tersebut juga dapat merusak nama baik instansi pemerintahan dan juga nama baik dirinya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, kepala desa belum melakukan sosialisasi secara maksimal pada para perangkat desa karena beliau menganggap bahwa perangkat desa sudah paham mengenai sanksi yang diterima ketika melakukan praktik KKN, seperti yang disampaikan oleh Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji :

“untuk mengurangi praktik KKN ini saya selalu menekankan pada para perangkat untuk tidak melakukan hal tersebut, saya juga memberikan pemahaman dampak kalo kita melakukan korupsi atau semacamnya, tapi memang hanya itu yang saya lakukan sih karena saya percaya kalo perangkat di desa ini tidak melakukan hal tersebut dan memang selama saya menjabat disini tidak ada kasus seperti itu mba, kalau memang ada ya saya akan tindak tegas” (Wawancara dengan Bayu Setyo Nugroho, 30 Maret 2022)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam mengurangi adanya praktik KKN ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman pada perangkat desa tentang dampak dari KKN itu sendiri, namun dalam sosialisasi tersebut memang belum berjalan secara maksimal dikarenakan kepala desa Dermaji masih menaruh kepercayaan pada perangkat desa bahwa perangkat desa sudah paham

akan dampaknya dan kejadian KKN juga belum pernah terjadi di Desa Dermaji.

Dari data-data yang didapatkan di lapangan dan telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kepala desa dalam penerapan prinsip akuntabilitas belum terlaksana secara maksimal, masih ada kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam penerapannya. Kepala desa memang telah mengadakan rapat penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaporan tersebut juga disampaikan secara transparan baik secara tertulis maupun melalui media digital, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di desa, kemudian hasil laporan tersebut juga sudah diterima dan disahkan melalui SK BPD Nomor 1 Tahun 2022 Namun dalam hal penerapan sanksi dan pencegahan praktik KKN ini, kepala desa kurang tegas dalam memberikan teguran kepada perangkat desa yang tidak mematuhi aturan SOP ketepatan waktu datang ke kantor dan juga kurang maksimal dalam memberikan pemahaman pada perangkat desa mengenai praktik KKN karena beliau menganggap bahwa perangkat desa sudah paham mengenai sanksi yang diterima ketika melakukan praktik KKN serta selama beliau menjabat sebagai kepala desa juga belum pernah terjadi praktik KKN di desa Dermaji.

B. Transparansi

Prinsip transparansi ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana peran pemerintah desa terutama kepala desa dalam memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai kegiatan desa maupun mengenai transparansi penggunaan dana desa.

Transparansi keuangan merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, dengan adanya transparansi tersebut, masyarakat mampu mendapatkan informasi yang jelas sehingga mereka mampu menggunakannya sebagai pembanding realisasi dengan anggaran dananya, untuk melihat ada tidaknya tindakan korupsi maupun manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Mahmudi, 2010). Menurut UNDP, pemerintahan harus dibangun atas dasar keterbukaan akses informasi yang dibutuhkan oleh setiap

orang, hal ini dapat diukur dari seberapa mudahnya masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu dalam transparansi ini perlu adanya pembuatan sistem pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan apabila ada pihak pemerintah yang melanggar peraturan, serta meningkatkan akses informasi melalui kerjasama bersama media massa maupun lembaga non pemerintahan.

Keterbukaan akses informasi ini telah diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dimana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi publik, dan pihak publik atau pemerintahan wajib menyediakan akses informasi yang jelas. Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan pihak pemerintah desa, oleh karena itu dengan adanya keterbukaan informasi ini diharapkan tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak pemerintah serta mampu mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bersih serta pembuatan kebijakan disusun atas dasar kepentingan bersama.

Dalam prinsip transparansi ini terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik

Dengan tersedianya informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintahan, karena masyarakat mengetahui dana desa tersebut digunakan untuk kebutuhan apa saja dan masyarakat juga melihat serta merasakan sendiri hasil dari alokasi dana tersebut. Dalam indikator ini, peran kepala desa menjadi faktor utama untuk mewujudkan terciptanya pemerintahan yang transparan. Upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Dermaji yaitu memberikan ruang akses informasi untuk warga desa melalui musyawarah serta sosialisasi mengenai perumusan anggaran desa, pelayanan sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Kepala desa Dermaji selalu menekankan pada para perangkat desa supaya terbuka pada masyarakat mengenai pendanaan desa dan selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu kebijakan, kepala desa juga turut melakukan

pendekatan dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi, hal tersebut disampaikan oleh Haryy Haryono selaku sekretaris Desa Dermaji sebagai berikut :

“pak kepala desa selalu memberikan informasi yang terbuka kepada siapapun yang membutuhkan informasi, pak bayu ini juga sering memberi arahan pada kami (perangkat desa) supaya menjalankan pemerintahan secara terbuka, kami selalu nglakuin sosialisasi dulu sebelum membuat suatu kebijakan, mereka juga ikut memberikan masukan tentang kebijakan itu, jadi ya engga ada yang ditutu-tutupi, mereka benar-benar tau dana tersebut digunakan untuk apa, bahkan supaya masyarakat lebih percaya pada pihak pemerintah, pak bayu turun tangan sendiri untuk sosialisasi ke masyarakat”(Wawancara dengan bapak Harry Haryono, 11 Februari 2022)

Kepala desa juga memprioritaskan adanya transparansi informasi pada masyarakat supaya mereka bisa memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, kepala desa juga selalu meminta pendapat dari tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa dermaji ketika hendak memutuskan suatu kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Kusmidi selaku tokoh masyarakat, ia mengatakan bahwa :

“kepala desa ini punya peran penting dalam menjalankan keterbukaan informasi, entah itu tentang informasi dana desa apa informasi tentang program yang mau beliau buat, trus sebelum membuat kebijakan itu pak bayu biasanya rembug dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat, beliau menanyakan kebijakan ini bagaimana, cocok untuk diterapkan di desa dermaji atau tidak, trus selanjutnya ya didiskusikan lagi dengan para perangkat desa, begitu mba” (wawancara dengan Bapak Kusmidi, 16 Februari 2022)

Hasil dari data-data yang didapatkan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam indikator penyediaan informasi pada setiap proses merumuskan suatu kebijakan dapat dilihat dari himbauan kepala desa kepada perangkat desa untuk selalu memberikan informasi secara jelas pada masyarakat, kepala desa juga mensosialisasikan program-program yang hendak ditetapkan serta memasang informasi-informasi desa di kantor balaidesa Dermaji.

2. Adanya akses informasi yang siap, mudah dijangkau, dan terbuka untuk masyarakat umum

Bentuk dari transparansi ini tidak hanya melalui penyediaan informasi secara langsung dari pihak pemerintahan, namun juga bisa melalui media digital. Adanya peran dari media digital ini dapat berpengaruh besar bagi terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, dan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ini juga menuntut pemerintahan desa untuk semakin kreatif dalam menyampaikan informasi mengenai desa melalui berbagai media yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan membuat sistem informasi desa melalui media online yang berupa website desa, facebook desa, dan youtube desa. Kepala desa menekankan harus adanya pemberian akses informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan akses informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh kalangan yaitu melalui media sosial dan website desa tersebut. Dimana melalui media digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan informasi yang dibutuhkan seseorang ketika hendak mencari data pendukung maupun data penunjang lainnya.

Sejak kepemimpinan Bayu Setyo Nugroho, website desa ini mulai dijalankan dan yang mengelolanya yaitu sekretaris desa beserta Karangtaruna dan anak-anak muda di setiap RW. Website desa ini berisi mengenai sejarah desa, jumlah penduduk desa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa, serta potensi yang dimiliki desa. Harapan dibuatnya website desa supaya desa Dermaji ini semakin dikenal oleh khalayak publik, dan hal ini sudah terbukti dengan penghargaan yang diraih oleh

Desa Dermaji di Jayapura Papua dalam acara Destika desa.id Award 2016, yang mana dalam penghargaan tersebut desa Dermaji dinobatkan sebagai desa yang menjadi salah satu perintis publikasi daring yang mampu memanfaatkan domain internet khusus desa. Dan dalam kesempatan wawancara dengan Kepala Desa Dermaji, beliau menyampaikan sejarah adanya website desa sebagai berikut :

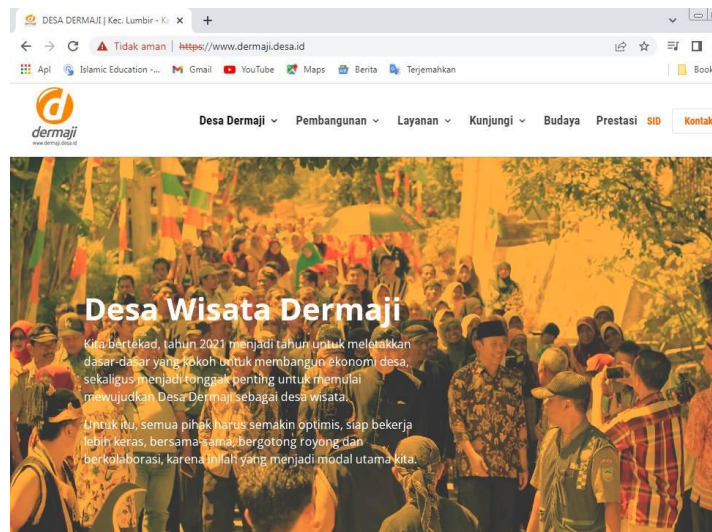
“dalam pengelolaan website desa ini dikelola oleh KIM(Kelompok Informasi Masyarakat), jadi kita membentuk tim redaksi website desa, dimana pimpinan redaksinya itu pak carik selaku PID (Pengelola Informasi Desa), nah anggota-anggotanya sebagian besar isinya itu dari anak-anak muda Karangtaruna dan lain-lainnya untuk membantu redaksi website desa, mereka ini sudah kita latih bagaimana cara menulis berita, membuat video maupun membuat foto-foto yang keren. Jadi harapan dibuatnya website desa ini supaya orang-orang bisa mengenal desa Dermaji karena kan saat ini itu apa-apa melalui media online. Terus sejarah website desa ini tuh sebenarnya panjang, di website desa juga kita tulis sejarahnya itu, jadi cerita singkatnya kita ini sudah mengawali mulai tahun 2008 yang awalnya kita menggunakan blog gratisan yaitu blog.id, waktu itu internet belum semasif sekarang ini ya kalau mau internetan saja kita dulu harus ke tempat warnet, dan alasan kenapa saya membuat itu pertimbangannya pertama Dermaji ini belum banyak dikenal dan letaknya kan relatif terisolir waktu itu, jadi pejabat atau orang-orang dari luar kan males kesini ya jalannya masih berbatu, kedua warga desa Dermaji ini banyak yang bekerja menjadi TKI di luar negeri dan banyak juga anak-anak Dermaji yang sekolah di luar desa Dermaji, nah saya berfikir supaya mereka-mereka ini tau di Dermaji itu lagi ada apa, bagaimana potensinya, lah ini harus di informasikan lewat internet ini maka saya membuat

website desa, nah alhamdulillah setelah buat website desa ini, orang-orang mulai pada tau desa dermaji, banyak juga dari universitas-universitas yang melakukan penelitian dan mengambil data awalnya dari website tersebut, nah seiring dengan ditetapkannya desa.id sebagai domain desa melalui peraturan kominfo nomor 5 tahun 2015, maka kita menggunakan nama dermaji.desa.id sebagai website resmi desa. Nah ya pada tahun 2016 kita mendapatkan penghargaan dari kementerian kominfo karena istilahnya ya kita ini bisa tetap istiqomah website desa itu tetap berjalan gitu” (Wawancara dengan Kepala Desa Dermaji, 7 Februari 2022).

Kemudian sejak adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, website desa mengalami pengembangan, website bukan hanya digunakan sebagai media informasi kegiatan desa tetapi juga menjadi media transparansi pembangunan desa dan juga diharapkan mampu menjadi salah satu rintisan *e-commerce* yang memasarkan produk-produk di desa. Di desa dermaji ini sudah melakukan hal tersebut, website desa dermaji sekarang ini tidak hanya berisi sejarah dan kegiatan-kegiatan desa saja, tetapi juga ada informasi mengenai transparansi dana desa dan perencanaan pembangunan desa, serta mereka juga memasarkan produk UMKM Desa melalui website desa tersebut.

Dalam mengembangkan website desa ini, kepala desa juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pegiat IT, pegiat desa, relawan TIK, blogger Banyumas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kepala desa meminta bantuan mereka untuk menjadi narasumber dalam media sosial maupun website desa, kepala desa juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pemuda karangtaruna desa mengenai penulisan berita, dan juga mensosialisasikan adanya website desa kepada masyarakat.

Gambar 8. Tampilan Website Desa Dermaji



Mekanisme penulisan di website ini ditulis oleh anggota tim redaksi ketika di wilayahnya ada kegiatan, kemudian tulisan berita tersebut dilaporkan kepada sekretaris desa untuk di edit dan di upload di website desa. Akan tetapi dalam pengelolaan website desa ini, yang memiliki akses ke akun website desa hanya sekretaris desa, oleh karena itu dalam hal upload berita ke website desa masih terdapat kendala. Hal ini disampaikan oleh Harry Haryono selaku Sekretaris desa Dermaji, beliau menyampaikan bahwa :

“ya untuk yang memiliki akses ke web desa ini memang hanya saya mba, trus yang melaporkan berita-beritanya itu dari anggota, trus ketika kumpul itu pokoknya saya selalu menekankan setiap ada kegiatan di masing-masing wilayah itu harus membuat coretan sama foto kegiatan, nah nanti diserahkan ke saya buat diedit lagi, baru nanti saya masukkan ke website desa, namun memang semenjak pandemi ini kita sedang jarang update, karena kegiatan di desa ini berkurang dan kita juga fokus ke penanganan covid-19, jadi kita punya kesibukan masing-masing trus jarang update web, nah yang masih update sampe sekarang ya paling youtube karena dibantu oleh pak

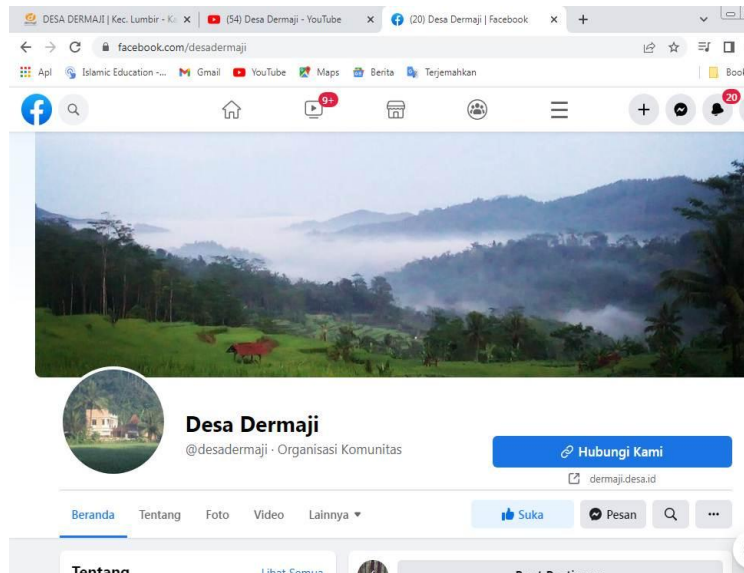
kades". (Wawancara dengan Bapak Harry Haryono, 23 Februari 2022)

Penulis juga melakukan wawancara ke beberapa masyarakat terkait website desa Dermaji, dan sebagian masyarakat ada yang merasa belum puas terhadap informasi yang disampaikan dalam website tersebut karena adanya keterlambatan informasi yang di upload pada website, kemudian salah satu anggota tim redaksi juga mengatakan bahwa yang bisa mengakses website tersebut hanyalah sekretaris desa, oleh karena itu anggota tim redaksi merasa kurang dipercaya. Anggota tim redaksi tersebut salah satunya yaitu oleh Andi, ia mengatakan bahwa :

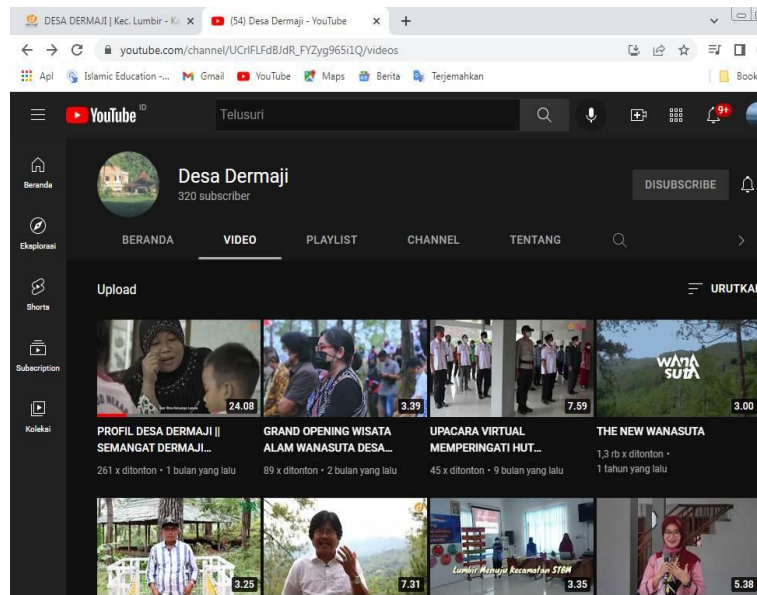
"jadi gini mba, dalam website desa itu yang bisa mengakses, yang bisa mengupload berita-berita itu hanya pak carik saja, kami (anggota) hanya ditugaskan untuk mencatat ketika ada kegiatan di desa, kemudian kami setorkan ke pak carik, nah nanti yang upload di website itu ya pak carik, kita nggak memiliki akses ke website desa, jadi ya kalau upload itu nunggu pak cariknya senggang, nah dari situ kan jadi berita-berita yang diupload itu terlambat trus juga menurut saya website itu masih kurang di update, mba bisa liat sendiri lah di website desa itu pasti masih ada informasi-informasi yang kurang di update contohe ya struktur pemerintahan itu kan belum lengkap kan mba, kedepannya ya saya berharap yang bisa mengakses website itu jangan cuma pak carik aja tapi ya ada lah satu atau dua perwakilan dari kita biar bisa bantu handle upload di website, biar websitenya itu tetap update" (Wawancara dengan mas Andi selaku tim redaksi, 23 Februari 2022).

Kemudian untuk pengelolaan facebook dan youtube desa itu juga yang mengelola dari tim redaksi desa, namun untuk facebook dan youtube desa ini seringkali dibantu oleh kepala desa dalam upload berita maupun pembuatan konten untuk youtube desa. Kepala desa ikut serta dalam membuat konten youtube desa, bahkan tidak jarang kepala desa yang menjadi sutradaranya.

Gambar 9. Tampilan Facebook Desa



Gambar 10. Tampilan Youtube Desa



Simpulan dari indikator ini menurut penulis yaitu peran kepala desa dalam menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat ini dilakukan dengan memanfaatkan media online seperti pembuatan website desa, youtube dan facebook desa, kepala desa juga

melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan akses informasi desa. Namun dalam pelaksanaannya memang belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu kurang update nya informasi yang di upload di website desa tersebut, yang memiliki akses ke website hanya sekretaris desa saja, kemudian masyarakat ada yang masih belum puas terhadap informasi yang disampaikan dalam website tersebut, masyarakat berharap kedepannya website desa tersebut bisa lebih update seperti youtube maupun facebooknya.

3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Berkat adanya kemudahan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa, baik informasi yang diberikan secara langsung melalui musyawarah, diskusi terbuka antar warga desa maupun informasi yang diberikan melalui website dan sosial media milik desa, menjadikan masyarakat paham mengenai pengelolaan pemerintahan desa maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Salah satu contoh yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dari adanya pemasangan spanduk informasi mengenai realisasi APBDes, informasi struktur penanganan covid-19, dan informasi lainnya. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi paham kemana alokasi dana tersebut, kemudian pemasangan struktur penanganan covid-19 juga menjadikan masyarakat mengerti kepada siapa ia harus melaporkan ketika ada keluarga atau tetangganya yang mengalami gejala virus tersebut. Dengan adanya website desa juga menjadikan masyarakat semakin mengenal desanya, seperti yang disampaikan oleh Wahyu selaku warga desa Dermaji sebagai berikut :

“adanya website desa ini sangat berpengaruh bagi warga mba, karena di web desa kita malah jadi lebih banyak tau tentang potensi yang dimiliki desa, yang tidak disangka bisa sebanyak itu, trus juga lewat web itu kita jadi tau tentang transparansi pendanaan di tahun-tahun sebelumnya” (Wawancara dengan Wahyu selaku warga desa Dermaji, 23 Februari 2022)

Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa mengenai kebijakan yang akan diterapkan di desa ini memang bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dan juga supaya masyarakat paham bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dengan pengetahuan yang didapatkan tersebut masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, dan ikut mengawasi berjalannya pemerintahan.

“berkat adanya sosialisasi serta adanya ruang diskusi publik yang disediakan oleh pihak pemerintahan, kami jadi tau bagaimana kinerja pemerintahan desa, dan kami juga tau kemana harus mengadukan masalah maupun memberikan saran, pak kades juga memberi tau kita tentang pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa” (Wawancara dengan Andi Wibowo selaku warga Desa Dermaji, 23 Februari 2022)

Simpulan dari hasil data yang didapatkan di lapangan yaitu peran kepala desa dalam memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan cara pembuatan sistem informasi desa, adanya spanduk-spanduk di kantor balaidesa, dan juga kepala desa turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, dari hal-hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat paham mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Dari data-data yang didapatkan di lapangan dan telah dipaparkan, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip transparansi ini kepala desa telah menjalankan peranannya sesuai dengan semua indikator yang terdapat dalam prinsip transparansi dengan baik, dan kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya pemerintahan yang transparan yaitu dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui informasi secara langsung maupun melalui informasi di media digital mengenai kegiatan yang dilakukan oleh desa dan pengelolaan dana desa supaya masyarakat tidak menaruh rasa curiga pada pihak pemerintahan, kepala desa juga selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan ditetapkan

dan memberikan ruang diskusi bagi masyarakat untuk mengajukan pendapatnya. Namun dalam pelaksanaan salah satu dari indikator prinsip transparansi ini memang masih terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu mengenai website desa yang kurang update dalam memberikan informasi karena yang dapat mengakses website tersebut hanya satu orang saja.

C. Partisipasi

Prinsip partisipasi ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam perumusan serta pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa, dan juga digunakan untuk menganalisis bagaimana peran yang dilakukan oleh seorang kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut UNDP, partisipasi memiliki arti bahwa setiap warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak suara dan kebebasan untuk berpendapat, dan ikutserta dalam kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Prinsip partisipasi ini menjamin adanya pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikutserta dalam setiap pembuatan kebijakan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Partisipasi juga merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang pembangunan, baik pembangunan secara ekonomi, politik, maupun sosial. Oleh karena itu, untuk menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik, pemerintahan desa harus menyertakan keikutsertaan warga desa pada berbagai proses pengambilan keputusan karena dengan adanya partisipasi ini dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta juga dapat membawa desa semakin berkembang secara pesat, baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial.

Bentuk partisipasi masyarakat harus dibangun atas dasar prinsip demokrasi yaitu masyarakat diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bab keenam pasal 68 menerangkan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan maupun tertulis mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam prinsip partisipasi ada 4 indikator yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu :

1. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama

Dalam indikator ini berarti pihak pemerintah berperan sebagai mediator (penengah) bagi berbagai kelompok masyarakat ketika ada perselisihan pendapat dalam proses diskusi perumusan kebijakan yang akan ditetapkan. Dalam hal ini kepala desa Dermaji selalu ikut dalam setiap sosialisasi kepada masyarakat maupun dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, sehingga ketika ada perselisihan pendapat ini kepala desa menjadi penengah bagi masyarakat dan tidak jarang juga memberikan masukan yang tidak memihak salah satu dari kelompok masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Sarjo selaku Kepala Dusun, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa :

“ketika kita mengadakan diskusi-diskusi, baik diskusi khusus maupun diskusi musyawarah dusun itu pak kades selalu ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut, nah dalam diskusi tersebut kan biasanya ada perselisihan pendapat contohnya masing-masing RW mengusulkan wilayahnya yang harus terlebih dahulu dibenahi, nah disitu biasanya kepala desa menjadi penengah gitu, pak kades memberikan saran dan masukan yang tidak menyinggung salah satu pihak, jadi ya masukan dari pak kades ini seringkali didengar oleh masyarakat”

(Wawancara dengan bapak Sarjo selaku Kepala Dusun, 15 Maret 2022)

Dari data diatas, menurut penulis dapat ditarik simpulan bahwa peran kepala desa dalam pengambilan keputusan ini, kepala desa memiliki peran sebagai mediator atau penengah ketika menyelesaikan permasalahan, kepala desa harus netral dan memberikan masukan-masukan yang tidak merugikan satupun kelompok masyarakat.

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah

Dalam hal meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintahan desa, peneliti melihat dari sisi pengaruh kepemimpinan kepala desa serta pelaksanaan kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan atau belum.

Berkat adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah, masyarakat menjadi percaya terhadap pihak pemerintah karena mereka selalu dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan dan masyarakat merasa pendapatnya dihargai oleh pihak pemerintah.

“pihak pemerintah itu selalu terbuka pada kami, pak kades juga selalu mensosialisasikan kepada kami tentang kebijakan yang akan ditetapkan, beliau menjelaskannya secara rinci, trus beliau ini juga mau mendengarkan pendapat kami, dan kebijakan yang dibuat juga direalisasikan sesuai rancangan, jadi kami percaya pada pihak pemerintah desa” (Wawancara dengan Sudi Hartono selaku warga desa Dermaji, 9 Maret 2022)

Dan tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah ini juga tidak terlepas dari adanya peran kepala desa, karena dari adanya sikap kepala desa yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan berbaur dengan masyarakat, hal tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintahan terutama kepala desa. Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dibuktikan dari masa jabatan Bayu Setyo Nugroho selaku kepala desa Dermaji yang mampu bertahan selama tiga periode yaitu sejak tahun 2005 hingga saat ini, beliau ini sangat dihargai oleh perangkat desa maupun masyarakat karena sikap mengayomi dan kewibawaannya. Dalam kesempatan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku ketua BPD, beliau menyampaikan bahwa :

“kepala desa saat ini pak bayu sangat disegani dan dipercayai oleh masyarakat maupun perangkat desa karena beliau ini ramah, trus selama memimpin beliau juga bijaksana dan bisa mengayomi kita semua, pas mau memutuskan sesuatu selalu diskusi dulu dengan perangkat

desa dan BPD, kemudian disosialisasikan pada masyarakat dan meminta pendapat dari masyarakat juga baiknya gimana. Latarbelakang dan pengalaman beliau juga sudah banyak, jadi kami percaya pada cara beliau mengelola pemerintahan ini” (Wawancara dengan Sutrisno selaku BPD, 9 Maret 2022)

Latarbelakang pendidikan kepala desa juga dapat mempengaruhi berjalannya pemerintahan dan kepercayaan masyarakat, di desa Dermaji ini kepala desanya memang berbasik sarjana pemerintahan sehingga paham mengenai bagaimana harus menjalankan pemerintahan dan beliau juga asli berasal dari Desa Dermaji, yang mana sudah dapat dipastikan beliau memahami seluk beluk desanya. Dalam wawancara dengan Harry Haryono selaku sekretaris desa Dermaji, beliau menyampaikan bahwa

“penyebab masyarakat percaya sama pemerintah desa salah satunya ya karena pak bayu ini, saya juga mengakui itu, beliau kan asli dari desa sini, jadi ya beliau sudah tau lah bagaimana keadaan desa, makanya pas mengelola pemerintahan ini ya disesuaikan dengan keadaan desa, beliau tau mana yang memang harus diprioritaskan, makanya saya itu lebih setuju kalo kepala desa itu harus dari orang desanya sendiri karena yang sudah tau keadaan desanya. trus mohon maaf sebelumnya nih ya mba, memang tidak bisa dipungkiri kalo latarbelakang pendidikan itu sangat penting, nah pak bayu ini kan lulusan S2 jadi ya pengalamannya pasti sudah banyak lah ya, desa dermaji ini bisa dikenal publik juga karena trobosan-trobosan yang beliau buat, menurut saya ini beliau orangnya visioner, inovatif, smart gitu mba” (Wawancara dengan Harry Haryono selaku sekretaris desa, 15 Maret 2022)

Sebagian besar masyarakat juga mengatakan bahwa desa Dermaji ini bisa menjadi desa yang lebih maju berkat adanya peran kepala desa saat ini yaitu Bayu Setyo Nugroho, bahkan mereka berharap kepala desa

setelahnya ini bisa seperti bapak Bayu yang mau mengayomi dan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat desanya.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah dipengaruhi adanya peran kepala desa, kepala desa yang mampu mengayomi masyarakatnya, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan juga latarbelakang pendidikan yang ditempuh oleh kepala desa sehingga masyarakat mempercayai bapak Bayu sebagai kepala desa selama tiga periode.

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kritik saran dari masyarakat

Dalam indikator ini, penulis menganalisis sejauhmana peran kepala desa dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kritik saran masyarakat, peneliti melihat bagaimana respon pemerintah terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat mengenai pembangunan desa.

Pihak pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik saran secara langsung pada pihak pemerintah desa mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat diberi kebebasan untuk memberi penilaian apakah kebijakan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum, dan apabila kebijakan tersebut dirasa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka mereka diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik saran dan masukannya pada perangkat desa maupun kepala desa, yang mana masukan tersebut ditampung oleh pemerintah dan akan didiskusikan ulang. Dalam hal ini, kepala desa juga selalu menekankan pada perangkat desa untuk selalu tanggap dalam menerima masukan-masukan dari masyarakat.

“pemdes harus mempunyai kemampuan untuk bagaimana menangkap gagasan ide dari masyarakat, bagaimana menangkap potensi yang ada di masyarakat, kemudian merumuskan itu menjadi suatu program kerja, yang kita lakukan seperti itu” (wawancara dengan Kepala Desa Dermaji, 22 Maret 2022)

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kritik saran dari masyarakat yaitu kepala desa terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya keterlibatan serta masukan-masukan dari masyarakat untuk kemajuan pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa masukan dari masyarakat yang memang belum direalisasikan oleh pihak pemerintah desa, seperti yang diutarakan oleh bapak Ibnu selaku kelompok tani, beliau mengatakan bahwa masukannya mengenai pembuatan bendungan untuk sawah ini belum direalisasikan oleh pihak pemerintah. Kemudian dalam kesempatan wawancara dengan bapak Harry Haryono selaku Sekretaris Desa, beliau juga menyampaikan bahwa pihak pemerintah desa memang menampung semua masukan dari masyarakat, namun tetap dipilih mana yang paling prioritas dan disesuaikan dengan anggaran dana desa.

Berdasarkan data-data yang didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam peningkatan kuantitas dan kualitas kritik saran dari masyarakat yaitu melalui pemberian kebebasan terhadap masyarakat untuk memberikan masukan pada pihak pemerintah, kemudian kepala desa juga melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan serta pemberian masukan-masukan dari masyarakat terhadap pembangunan desa.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting karena pembangunan desa ini bertujuan untuk membuat desa tersebut maju serta mampu memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang terdapat di desa, oleh karena itu dengan adanya keterlibatan masyarakat ini diperlukan untuk mendapatkan hasil dari pembangunan yang sesuai dengan harapan dan keperluan masyarakat. Dalam indikator ini, adanya peran dari kepala desa juga sangat penting, yang mana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini kepala desa harus bisa mendekatkan diri dan memosisikan dirinya sebagai masyarakat umum. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kepala desa dermaji

melakukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat dan juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi warga desa, yaitu dengan membuat forum diskusi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam diskusi tersebut masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya mengenai pembangunan desa, kemudian kepala desa juga menyampaikan betapa pentingnya peran masyarakat karena dalam membangun desa itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu masyarakat harus ikut berpartisipasi supaya dapat terwujud pembangunan desa yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Kemudian pemerintah desa juga memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan atau RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), yang mana sebelum mengadakan musrembangdes ini, pemerintah melakukan musyawarah dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan setiap unsur masyarakat dusun tersebut. Selain itu, kepala desa juga membuat suatu inovasi yaitu mengadakan ruang diskusi-diskusi khusus dengan setiap kelompok masyarakat yang ada di desa supaya mereka bisa menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Dermaji, beliau menyampaikan bahwa :

“dalam proses perencanaan pembangunan, kalau sesuai regulasi kan kita melakukan musyawarah dusun dulu kemudian baru musyawarah desa, nah menurut saya ini kurang menyerap aspirasi masyarakat ya, karena rata-rata yang diusulkan di musdus itu cuma pembangunan jalan, nah makanya di desa dermaji ini saya berinovasi membuat ruang-ruang diskusi khusus misalnya perencanaan khusus bidang peternakan, ya yang diundang itu kelompok ternak, kemudian perencanaan di bidang kesehatan dan pendidikan yang diundang ya aktifis pendidikan, perencanaan pemberdayaan perempuan ya yang diundang

kelompok PKK, disitu mereka bebas berdiskusi mengenai cara memajukan bidangnya, nah itulah yang kita serap yang kemudian kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan kita sesuaikan dengan anggarannya”
(Wawancara dengan Kepala Desa, 22 Maret 2022)

Adanya ruang diskusi khusus bagi kelompok masyarakat yang disediakan oleh pemerintah desa juga mendapat respon yang bagus dari masyarakat, hal ini dilihat dari antusiasnya kelompok masyarakat yang datang saat rapat di kantor balaidesa Dermaji. Masyarakat selalu aktif mengikuti diskusi tersebut dari awal acara hingga selesai, mereka mengatakan bahwa dengan adanya ruang diskusi khusus tersebut membuat setiap kelompok yang ada di desa bisa menyampaikan kebutuhannya secara spesifik dan mereka juga merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah desa. Kepala desa juga turun langsung menemui masyarakat yang belum bisa hadir dalam musyawarah dusun maupun musyawarah khusus kelompok, hal ini guna untuk melihat keadaan masyarakat dan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat serta kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berkat adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat ini, desa Dermaji juga mampu mendapatkan penghargaan PNPM mandiri pedesaan, yaitu penghargaan atas perencanaan partisipatif pembangunan desa karena besarnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta adanya pembuatan ruang diskusi khusus bagi setiap kelompok masyarakat yang ada di desa. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Dermaji, beliau menyampaikan bahwa :

“pada 2014 desa Dermaji mendapatkan penghargaan PNPM sebagai desa dengan perencanaan partisipatif terbaik gitu, ya karena salah satunya kita membuat ruang-ruang diskusi bagi banyak kelompok masyarakat”
(Wawancara kepala desa Dermaji, 22 Maret 2022)

Simpulan dalam indikator ini menurut penulis yaitu peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara membuat suatu inovasi penerapan diskusi-diskusi khusus bagi setiap kelompok yang ada di desa supaya pembangunan dapat berjalan merata,

kepala desa juga memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dari masyarakat, kemudian kepala desa juga turun langsung menemui masyarakat untuk melihat kebutuhan yang diperlukan serta mendengarkan masukan dari masyarakat.

Dari data yang didapatkan di lapangan, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam penerapan prinsip partisipasi ini dapat dilihat dari keaktifan kepala desa dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat, kepala desa juga membuat ruang-ruang diskusi khusus bagi kelompok masyarakat yang ada di desa supaya pembangunannya sesuai dengan kebutuhan bidangnya. Selain itu, kepala desa juga melakukan pendekatan secara langsung pada masyarakat yaitu dengan menemui warganya yang kurang aktif mengikuti rapat desa, hal ini dilakukan supaya pembangunan di desa dermaji dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala desa ini juga mendapat respon yang baik dari masyarakat, kepercayaan serta partisipasi masyarakat di desa dermaji menjadi semakin meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang didapatkan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepala desa Dermaji menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya yaitu penerapan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipasi, namun dalam penerapan ketiga prinsip tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip akuntabilitas, kepala desa memang telah mengadakan rapat penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaporan tersebut juga disampaikan secara transparan baik secara tertulis maupun melalui media digital, dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di desa, kemudian hasil laporan tersebut juga sudah diterima dan disahkan melalui SK BPD Nomor 1 Tahun 2022, namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kepala desa kurang tegas dalam memberikan teguran kepada perangkat desa yang tidak mematuhi aturan SOP ketepatan waktu datang ke kantor dan dalam pencegahan praktik KKN di Desa Dermaji ini kepala desa juga kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi pada para perangkat desa mengenai pencegahan praktik KKN karena kepala desa menganggap bahwa perangkat desa sudah paham mengenai sanksi yang diterima ketika melakukan praktik KKN, dan kasus KKN di Desa Dermaji juga memang dapat dinilai rendah, belum pernah ada yang terkena kasus KKN.

Kemudian peran kepala desa dalam penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui informasi secara langsung maupun melalui informasi di media digital mengenai kegiatan yang dilakukan oleh desa serta pengelolaan dana desa supaya masyarakat tidak menaruh rasa curiga pada pihak pemerintahan dan dalam pengelolaan informasi melalui media online ini kepala desa juga melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menjadi narasumber maupun penulis redaksi beritanya, kepala desa juga selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan usulannya. Dalam penerapan prinsip transparansi

ini juga masih ada kendala yang dihadapi yaitu kurang update nya informasi yang disediakan di website desa karena yang dapat mengakses website tersebut hanya satu orang saja, dan dalam hal ini kepala desa juga kurang tegas dalam menegur pimpinan redaksi berita website karena kelalaiannya dalam mengupdate informasi di website.

Selanjutnya peran kepala desa dalam penerapan prinsip partisipasi ini dapat dilihat dari keaktifan kepala desa dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat, kepala desa juga membuat ruang-ruang diskusi khusus bagi kelompok masyarakat yang ada di desa. Selain itu, kepala desa juga melakukan pendekatan secara langsung pada masyarakat yaitu dengan menemui warganya yang kurang aktif mengikuti rapat desa, hal ini dilakukan supaya pembangunan di desa dermaji dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala desa ini juga mendapat respon yang baik dari masyarakat, kepercayaan serta partisipasi masyarakat di desa dermaji menjadi semakin meningkat. Namun dalam penerapan prinsip partisipasi ini juga masih terdapat kendala yaitu dari sisi masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat ini belum direalisasikan semuanya karena menyesuaikan juga dengan anggaran desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk diterapkan di masa mendatang yaitu pemerintah desa harus tetap menjaga kinerjanya dengan baik, kepala desa sebaiknya lebih tegas dalam memberikan teguran pada perangkat desa yang lalai terhadap tugasnya serta lebih memberikan edukasi mengenai pencegahan kasus KKN, dan pihak pemerintah juga harus lebih meningkatkan informasi di website dan memberikan kewenangan akses kepada salah satu anggotanya supaya informasinya bisa selalu update. Kemudian pihak pemerintah juga harus lebih mensosialisasikan mengenai masukan-masukan dari masyarakat yang belum terealisasi supaya tidak ada kesalahpahaman dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2015). *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, . Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hetifah, Sj Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Marsh, David, & Stoker Derry. (2011). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Ndraha, Talizuduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Purnomo, Joko. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Raba, Manggaukang. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Raharja, Prathama. (2001). *Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: UI Press.
- Rosidi, Abidarini; Fajriani, Anggraeni. (2013). *Reinventing Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ruslan, Rosady. (2013). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saparin, Sumber. (2009). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghallia Indonesia.
- Satori, Djam'an, & Komariah, Aan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV Mandra Maju.
- Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Solekhan, Mochammad. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Suwendra, I, Wayan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nilacakra Publishing.

Sumber Jurnal :

Alfian, Yani. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*, 59-69.

Ali, Khaidir & Saputra, Agung. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol.14, No.4*, 602-614.

Arsik, Selfianti Faisal & Lawelar, Herman. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance : Studi Pemerintahan Desa Banabungi. *JSIP : Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 01-07.

Putra, Hendi Sandi. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda Vol.6 No.2*, 110-119.

Ramadhan, Irfan Adhitiya. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Unigal Repository Volume 01*, 268-278.

Suryani, Dewi Amanatun. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Informasi Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)*, 52-69.

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa

Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa

Perbup Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Perdes Dermaji Nomor 3 Tahun 2016 Tentang SOP Desa Dermaji

Peraturan BPK. Dipetik April 30, 2022, dari Peraturan bpk website:
<http://www.peraturan.bpk.go.id>

Sejarah Desa Dermaji. (2015). Dipetik Januari 11, 2022, dari Desa Dermaji website:
<http://www.dermaji.desa.id>

Desa Dermaji. (2021). Dipetik April 30, 2022, dari [dermaji.desa.id](http://www.dermaji.desa.id):
<http://www.dermaji.desa.id>

Paramita, Pradna. (2014). *SlideShare*. Retrieved April 30, 2022, from Slideshare website:
<http://www.slideshare.net/pradna/dokumen-rpjmd-desa-dermaji>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 663/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2022 Semarang, 23 Maret 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Lintang Nurul Fadilah
NIM : 1806016043
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cilacap, 20 Maret 2001
CP/e-mail : 088227727664 / lintangfadilah30@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Maftuh / Sumiyatun
Pekerjaan : -
Alamat : Tegalanyar Rt/Rw 02/03, Mujur Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kantor bag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

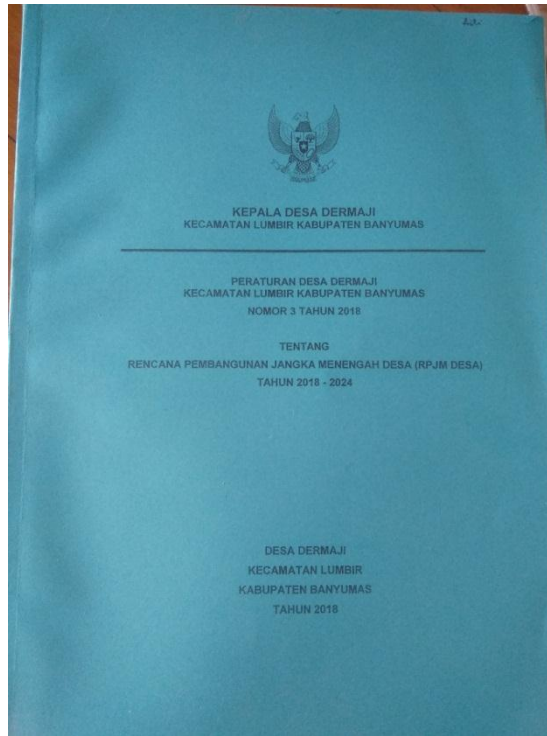
Lampiran 2. Dokumentasi Foto di Desa Dermaji

Museum Naladipa Desa Dermaji

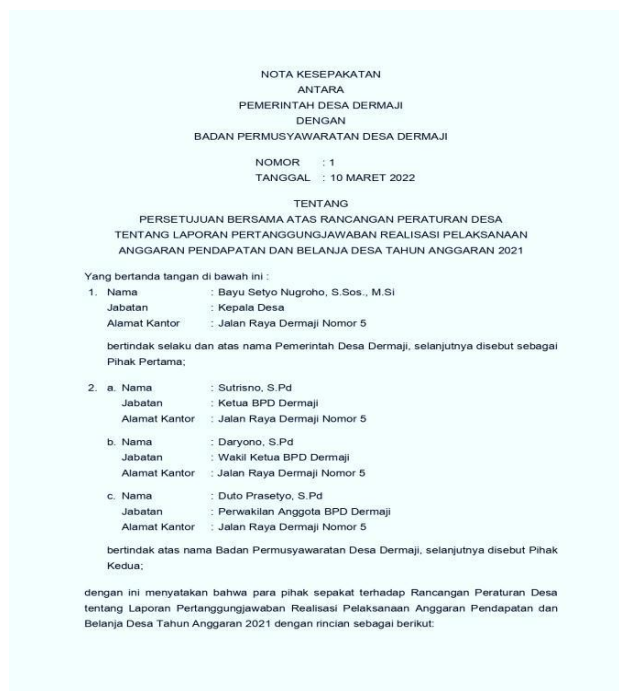


Lampiran 3. Dokumen Desa Dermaji

RPJMDesa 2018-2024



Nota Kesepakatan Realisasi APBDes



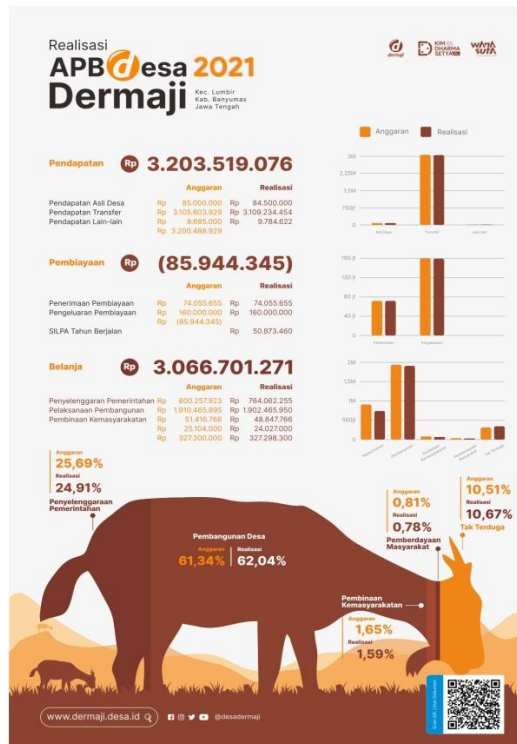
LPJ APBDes 2021

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DERMAJI
TAHUN ANGGARAN 2021**

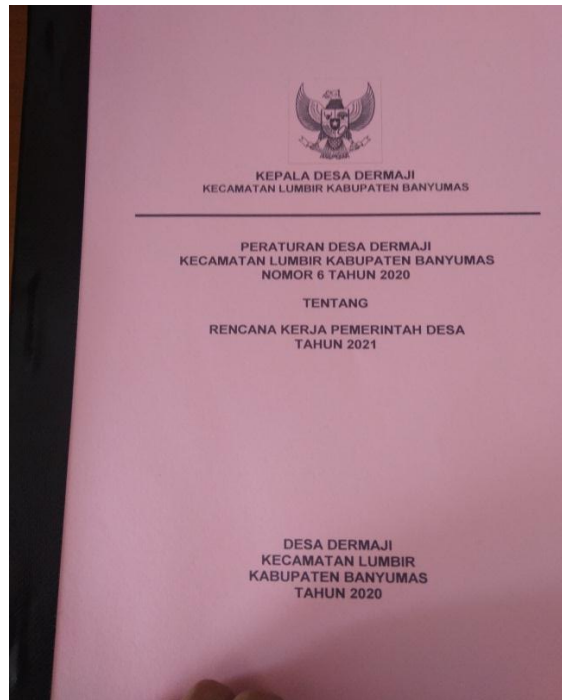
Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEMBERUTAN (Rp.)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	3.203.519.076	3.203.519.076	3.036.147,00
4.1.	Penerimaan Asli Desa	84.500.000,00	84.500.000,00	806.000,00
4.1.1.	Desanya, Partisipasi dan Gotong Royong	84.500.000,00	84.500.000,00	800.000,00
4.1.3.01.	Hasil Desanya, Partisipasi dan Gotong Royong	84.500.000,00	84.500.000,00	800.000,00
4.2.	Penerimaan Transfer	3.109.829.829,00	3.109.254.454,00	3.430.828,00
4.2.1.	Dana Desa	1.543.444.000,00	1.543.444.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	1.543.444.000,00	1.543.444.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	74.953.813,00	78.629.022,00	3.675.209,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	74.953.813,00	78.629.022,00	3.675.209,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	471.406.116,00	471.161.432,00	244.694,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	471.406.116,00	471.161.432,00	244.694,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	656.000.000,00	656.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	656.000.000,00	656.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.868.000,00	9.784.822,00	99.822,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
4.3.2.	Bunga Bank	488.000,00	584.822,00	99.822,00
4.3.2.01.	Bunga Bank	488.000,00	584.822,00	99.822,00
5.	BELANJA	3.203.519.076	3.203.519.076	3.036.147,00
1.	BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA	800.287.823,00	728.082.255,00	36.135.668,00
1.1.	Penyenggaraan Belanja Umum, Laksanakan dan Penyelenggaraan	800.287.823,00	800.287.255,00	33.289.863,00
1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.146.000,00	63.826.000,00	1.320.000,00
1.1.1.1.	Belanja Pegawai	65.146.000,00	63.826.000,00	1.320.000,00
1.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.146.000,00	63.826.000,00	1.320.000,00
1.1.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	53.396.000,00	53.396.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.	Tunjangan Pegawai	11.750.000,00	10.440.000,00	1.310.000,00
1.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.276.920,00	339.678.920,00	6.600.000,00
1.1.2.1.	Belanja Pegawai	346.276.920,00	339.678.920,00	6.600.000,00
1.1.2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat C	346.276.920,00	339.678.920,00	6.600.000,00
1.1.2.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	280.276.920,00	280.276.920,00	0,00

APBDes 2021



RKPDes

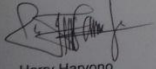



Hasil Musyawarah Khusus Peternakan

FORMULIR - 1

DAFTAR MASALAH, LOKASI KEGIATAN DAN VOLUME KEGIATAN
HASIL MUSYAWARAH KHUSUS PETERNAKAN

No	Kegiatan	Potensi
1	Keterbatasan modal untuk kelompok peternak	- Swadaya - Tenaga - Dinas Kabupaten
2	Pendampingan dalam proses kegiatan	- Swadaya - Pendamping Desa - Mantri Ternak
3	Peternak masuk dalam wadah yang sudah ada	- Swadaya - Tenaga - Poktan
4	Perlunya pembinaan kepada pelaku budidaya ternak	- Swadaya - Poktan - Pelaku Ternak
5	Kunjungan belajar ke sentra ternak di wilayah lain	- Swadaya - Poktan Unggulan - Pemdes
6	Dukungan stakeholder (Pemerintah dan pemerhati)	- Pemkab - Pemdes - Poktan
7	Dukungan teknologi tepat guna	- Pemkab - Pemdes - Poktan
8	Perluasan area pakan ternak	- Swadaya - Poktan - Tenaga

Pimpinan Rapat

Harry Haryono

Notulis

Sudi Hartono

Hasil Musdus I

HASIL MUSYAWARAH DUSUN 1		
No	Kegiatan	Potensi
1	Peningkatan jalan lingkungan RT 02 RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
2	Peningkatan jalan lingkungan RT 02 RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
3	Peningkatan jalan dan Talud Penahan Longsor Jalan Lingkung	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
4	Peningkatan jalan dan talud RT 05 RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
5	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 07 RW 03 Karangambu	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
6	Pembangunan Gedung Pos Paud Larasati	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
7	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 08 RW 03 Karangambu	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
8	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 06 RW 03 Karangambu	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
9	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 Karangambu	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
10	Jembatan Penghubung RT 03 - RT 06 RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
11	Pengadaan tempat pembuangan sampah di wilayah RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
12	Pengadaan benih ikan air tawar kelompok tani ikan air tawar di	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
13	Tempat ibadah di RT 03, RT 06, RT 08 RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
14	RTLH di wilayah RW 03	- Swadaya - Tenaga - Pemdes

Hasil Musdus II

DAFTAR MASALAH, LOKASI KEGIATAN DAN VOLUME KEGIATAN HASIL MUSYAWARAH DUSUN II		
No	Masalah	Potensi
1	Pembangunan Talud dan pelebaran Lapangan Sepak Bola Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
2	Peningkatan jalan dan RT 01 RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
3	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 02 RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
4	Peningkatan Jalan dan talud Lingkungan RT 03 RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
5	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
6	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 05 -RT 01 RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
7	Talud Penahan Longsor di kompleks Masjid Al Hidayah RT 03 RW 06	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
8	Peningkatan Jalan Penghubung RT 04 - RT 05 RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
9	Talud Penahan longsor di bawah TK Pertiwi Dermaji 3	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
10	Talud di kompleks Balai Pertemuan RT 04 RW 06	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
11	Peningkatan jalan Pangkalan -Ciwaru	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
12	RTLH di wilayah RW 06 Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
13	Talud penahan longsor sepanjang jalan Citunggul-Pangkalan	- Swadaya - Tenaga - Pemdes
14	Peningkatan Jalan Citunggul-Sirongge	- Swadaya - Tenaga - Pemdes

**TIME SCHEDULE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**

No	Uraian Kegiatan	Bulan												Penyelenggara/ Penanggung Jawab	Keluaran/Catatan	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I Musyawarah Desa																
1	Rapat BPD Pembahasan Rencana Musyawarah Desa Tahun Berikutnya														BPD	Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
2	Rapat BPD Pembentukan Panitia Musyawarah Desa														BPD	Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Penetapan Panitia Musyawarah Desa dengan Keputusan Ketua BPD
II Penyusunan RKP Desa																
1	Rapat BPD														BPD	Pandangan Resmi BPD Terkait Musyawarah Penyusunan RKP Desa Berita Acara Hasil Rapat BPD
2	Musyawarah Desa														BPD	Mencermati Ulang Dokumen RPJM Desa Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa (ditetapkan dalam Berita Acara) Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan Jenis Kegiatan dan Keahlian Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Jumlah Tim Antara 7 - 11 Orang)
3	Penyusunan RKP Desa oleh Tim														Tim Penyusun	Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk Desa Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Menyusun Daftar Usulan Pelaksanaan Kegiatan Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
4	Musyawarah Desa														BPD	Penetapan RKP Desa

Mater Plan 2025 Desa Dermaji



Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



A. Identitas Diri

1. Nama : Lintang Nurul Fadilah
2. NIM : 1806016043
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 20 Maret 2001
4. Alamat : jl. Toba no.18 RT/RW 02/03 Mujur Lor, Kec. Kroya. Kab. Cilacap
5. Jenis Kelamin ; Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. HP : 088227727664
8. Email : lintangfadilah30@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - 1) MI Darwata Mujur Lor
 - 2) MTs Wathoniyyah Islamiyah Kebarongan
 - 3) MAN 1 Banyumas
2. Pendidikan Non Formal
 - 1) Pondok Pesantren Al-Jamil Mersi Purwokerto
 - 2) Ma'had UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2022

Yang bersangkutan



Lintang Nurul Fadilah

1806016043